

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR HULU SUNGAI UTARA



RENCANA KERJA

KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2026



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA
NOMOR: KEP/ 42 /VII/2025 TANGGAL 30 JULI 2025

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR HULU SUNGAI UTARA**



RENCANA KERJA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2026



Amuntai, 30 Juli 2025

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR HULU SUNGAI UTARA



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA

Nomor : Kep / 42 / VII / 2025

tentang

RENCANA KERJA POLRES HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Polres Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 02 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Skep / 572 / XI / 2009 tanggal 2 Nopember 2009 tentang Draft Akhir Panduan Penyusunan Rencana Kerja di lingkungan Polri;
3. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
4. Peraturan Kapolri Nomor 17 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/778/V/2025 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
3. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/128/VII/2022, tentang Rencana Strategis Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan;
4. Keputusan

4. Keputusan Kapolda Kalimantan Selatan Nomor: Kep/130/VII/2025 tentang Rencana Kerja Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan T.A. 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA TENTANG RENCANA KERJA POLRES HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2026.

1. Rencana Kerja Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2026 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai pedoman kerja dan anggaran Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara;
2. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Amuntai

Pada tanggal: 30 Juli 2025

KAPOLRES HULU SUNGAI UTARA POLDA KALSEL



AGUS NURYANTO, S.I.K., M.Si.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77081244

Tembusan :

1. Kapolda
2. Wakapolda
3. Irwasda Polda Kalsel
4. Karo Rena Polda Kalsel.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR HULU SUNGAI UTARA

DAFTAR ISI :

BAB I. LATAR BELAKANG	1
1. Kondisi Umum	1
a. Perkembangan Aspek Kehidupan	3
b. Analisis SWOT	26
2. Identifikasi Masalah	32
BAB II. TUJUAN DAN SASARAN	34
1. Visi dan Misi	34
a. Visi dan Misi Polda Kalsel	34
b. Visi dan Misi Polres HSU	34
2. Tujuan Jangka Menengah	34
a. Tujuan Jangka Menengah Polda Kalsel	34
b. Tujuan Jangka Menengah Polres HSU	35
3. Sasaran Prioritas	36
a. Sasaran Prioritas Polda Kalsel	36
b. Sasaran Prioritas Polres HSU	37
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	37
1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalsel	37
2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres HSU	64
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF	85
1. Program dan Kegiatan Polres HSU	85
2. Pagu Indikatif	87
BAB V. PENUTUP	90

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Polres HSU TA. 2026;
2. Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja KL), Pagu Anggaran Polres HSU TA. 2026.



**RENCANA KERJA
KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA T.A. 2026**

I. Latar Belakang.

1. Kondisi Umum.

Tahun 2026 merupakan tahun ke-2 (satu) dari Tahapan Rencana Strategis Polres Hulu Sungai Utara dan kelanjutan dari Rencana Kerja Polres Hulu Sungai Utara T.A. 2026, sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Polres Hulu Sungai Utara T.A. 2026. Rencana Kerja Polres Hulu Sungai Utara T.A. 2026 ini merupakan penjabaran dari Rancangan *Grand Strategy* Polri dan Rancangan Rencana Strategis Polri 2025-2029. Rencana Kerja Polres Hulu Sungai Utara T.A. 2025 disusun dengan memperhatikan Rancangan Akhir RPJMN 2025-2029, yaitu: (1) pilar Penguatan Keamanan Dalam Negeri, Penguatan Intelijen, dan Penanggulangan Terorisme; (2) pilar Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai “*Safe Guarding*” penuntasan target prioritas nasional RPJMN 2025-2029 mengingat tahun 2025 adalah tahun pertama dari masa transisi serta dimulainya pemikiran RPJMN sebagai kelanjutan dari *Road Map Visi Indonesia 2025-2045*.

Pelaksanaan tugas Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup baik dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondisifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan Polri dalam pengungkapan kasus-kasus khususnya tindak pidana terorisme, Siber, Narkoba, Korupsi maupun kejahatan transisional lainnya dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif dari masyarakat serta dari dalam maupun luar negeri sehingga dapat mendukung kelancaran pembangunan nasional walaupun masih adanya

ditemukan

ditemukan komplain masyarakat terkait pelayanan publik Polri. Keberhasilan yang dicapai oleh Polri tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri dengan didukung oleh eksekutif, legislatif, yudikatif dan partisipasi masyarakat serta berbagai *stakeholders* yang terkait dengan tugas kepolisian. Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik terhadap kinerja Polri oleh pemerintah/swasta/masyarakat akan dijadikan tantangan bagi Polri dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang.

Keberhasilan yang diraih Polri diharapkan dapat membuat Polri semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan di masa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polri untuk dapat senantiasa terus- menerus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang kepolisian. Tantangan dan harapan masyarakat serta pemerintah kepada Polri yaitu: (1) Polri yang semakin profesional, cerdas, berintegritas, transparan, adil, dan humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang “*Presisi*”; (2) menggelar kekuatan Polri hingga ke perbatasan dan PPKT dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaan anggota Polri dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman; (3) menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil, legal dan humanis serta setara (*equality before the law*), terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana; (4) meningkatnya fungsi dan peran intelijen yang mampu mendekripsi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas.

Lingkungan strategis baik global, regional dan nasional sangat mempengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Polri. Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, di mana dunia menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat. Sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai yang

saling

saling mempengaruhi dan budaya bangsa yang positif berpotensi bisa berubah menjadi perilaku negatif seperti masih ditemukannya: eksklusifisme, materialisme, konsumerisme, hedonisme dan radikalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan lintas negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, perjudian, kejahatan siber, penyelundupan manusia, Narkoba, penyelundupan senjata dan penyelundupan barang. Dalam perkembangan lingkungan strategis regional masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan, baik di darat maupun laut, pencemaran lingkungan, penyebaran varian baru virus corona (Covid-19) yang bermutasi menjadi berbagai varian, pemberlakuan MEA, pengiriman TKI maupun penerimaan TKA, dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme. Selanjutnya perkembangan lingkungan strategi nasional harus dilihat dari faktor-faktor Ipolesosbud dan keamanan yang senantiasa bergerak dinamis dan senantiasa berubah di setiap daerah. Semua isu strategis baik global, regional dan nasional tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renja Polri T.A. 2026.

Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polda Kalimantan Selatan yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut akan digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan Aspek Kehidupan

1) Global

Lingkungan strategis global senantiasa berkembang dan dipengaruhi oleh isu-isu global seperti penyebaran isu perang antar negara, isu hak asasi manusia, krisis ekonomi, radikalisme, terorisme dan kejahatan lintas negara. Perubahan lingkungan strategis global di wilayah Kalimantan Selatan secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Perkembangan ekonomi dunia tampak tidak berubah. Posisi Amerika Serikat, Tiongkok, dan Eropa masih mendominasi

perannya

perannya. Perlambatan ekonomi dunia menyebabkan penurunan harga sejumlah komoditi seperti energi, mineral, logam, dan produk-produk pertanian. Gangguan rantai pasokan mulai mereda, tetapi terjadi dislokasi pasar energi dan makanan yang disebabkan oleh perang.

- b) Perkembangan ekonomi dunia tampak tidak berubah. Posisi Amerika Serikat, Tiongkok, dan Eropa masih mendominasi perannya. Perlambatan ekonomi dunia menyebabkan penurunan harga sejumlah komoditi seperti energi, mineral, logam, dan produk-produk pertanian. Gangguan rantai pasokan mulai mereda, tetapi terjadi dislokasi pasar energi dan makanan yang disebabkan oleh perang;
- c) Tantangan yang dihadapi Indonesia dan negara berkembang lainnya dalam rangka pemulihan ekonomi adalah tingginya utang luar negeri, melonjaknya harga pangan. Meningkatnya utang luar negeri akan berdampak pada menipisnya ruang-ruang fiskal yang berakibat pada terbatasnya kemampuan negara untuk melayani kepentingan warga negara;
- d) Konflik lahan, sumber daya alam, dan energi untuk memenuhi kebutuhan energi dan bahan baku industri masih akan terus berlangsung seiring dengan pemulihan ekonomi dan akselerasi ketegangan Tiongkok dan Amerika Serikat, Perang Rusia-Ukraina dan gejolak di sejumlah kawasan;
- e) Kerusakan lingkungan berdampak pada kelangkaan lahan, kelangkaan pangan, kelangkaan sumber energi, kelangkaan air bersih, dan udara bersih akan mengancam kelangsungan hidup manusia. Hal tersebut diperparah dengan adanya perubahan iklim yang menyebabkan terganggunya ketahanan dan kemampuan beradaptasi manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga secara signifikan akan mempengaruhi dinamika politik, perekonomian, krisis air, dan pangan, munculnya berbagai penyakit pandemik, migrasi penduduk, dan terjadinya konflik sosial;
- f) Isu

- f) Isu lingkungan hidup, perubahan iklim, HAM, demokrasi, Good Governance, terorisme masih menjadi topik utama diplomasi internasional. Hal tersebut didukung oleh kuatnya aktor non negara termasuk NGO dalam mempengaruhi diplomasi internasional dan perumusan kebijakan;
- g) Wabah penyakit dan bencana alam seperti banjir, gunung meletus, tsunami merupakan ancaman yang tidak bisa dihindari terutama bagi negara-negara yang mengalami kerusakan lingkungan dan terutama Indonesia yang berada pada cincin api dan pertemuan patahan Eurasia dan Australia;
- h) Perkembangan teknologi informasi yang cepat telah mengubah paradigma dan pola hidup masyarakat dunia. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara politik, ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan. Dampak dari masifnya pemanfaatan teknologi informasi adalah perang siber yaitu untuk melemahkan kemampuan pertahanan suatu negara. Modusnya adalah dengan melakukan sabotase, peretasan dan spionase terhadap sistem komputer, baik sipil maupun militer dan pertahanan, serta pengambilan data-data rahasia pemerintah negara lain bahkan pada sistem pengelolaan listrik, air, bahan bakar, transportasi dan komunikasi.

2) Regional

Perkembangan lingkungan strategis regional secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi Indonesia. Lingkungan strategis regional saat ini dipengaruhi beberapa isu, yaitu: konflik politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, sengketa perbatasan negara, baik perbatasan darat, laut, dan udara, kerja sama antara negara ASEAN di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan. Isu-isu strategis tersebut secara spesifik adalah sebagai berikut:

- a) Adanya pergeseran perhatian politik dunia dari Trans Atlantic ke Trans Pasifik. Wilayah Pasifik sendiri telah berdiri 2 blok perdagangan

- perdagangan yang masing-masing berafillasi ke Amerika Serikat dan Tiongkok. Netralitas ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam blok perdagangan di Asia Pasifik menjadikan ASEAN semakin strategis dan menguntungkan bagi negara anggota;
- b) Sengketa di Laut Cina Selatan berpotensi menjadi konflik terbuka karena para pihak yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan sering menggunakan instrumen militer untuk memperkuat klalmnya. Selain itu, adaya keterlibatan negara-negara di luar kawasan dalam konflik dan belum ada institusi atau organisasi internasional yang kredibel dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan. Akan tetapi, putaran perundingan terakhir antara ASEAN dan Tiongkok berpengaruh dalam penyelesaian sengketa secara damai dan bermartabat,
 - c) Kawasan Asia Timur, kompleksitas keamanan masih berpotensi tidak stabil karena Amerika Serikat masih tetap memainkan peranan pentingnya. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan di Semenanjung Korea, hubungan tradisional Amerika dengan Jepang dan Korea Selatan, serta kekhawatiran Amerika terhadap tampilnya Tiongkok sebagai kekuatan hegemoni regional, maupun karena kepentingan ekonominya;
 - d) Kawasan Asia Tengah diwarnai dengan kemenangan Taliban atas Kabul yang didukung Amerika Serikat yang secara langsung mendapatkan sambutan kerja sama ekonomi dari Tiongkok. Dinamika kawasan ini semakin menarik karena akan menjadi jalur sutera antara Asia dan Eropa dan menjadi pintu bagi Tiongkok untuk melakukan ekspansi ke wilayah Eropa. Hal Ini memecah konsentrasi konflik perebutan Laut Cina Selatan;
 - e) Kawasan Timur Tengah akan diwarnai ketegangan Iran dan Saudi Arabia untuk menjadi pemain tunggal di kawasan itu. Teluk Hurmuz menjadi wilayah perebutan bagi Iran. Kepentingan Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa terhadap energi di kawasan tersebut menyebabkan kawasan tersebut semakin rumit;
 - f) Kawasan

f) Kawasan strategis Timur Tengah yang menjadi pemicu ketegangan adalah Terusan Suez (Mesir) dan Bab el Mandeb (Djibouti-Yaman) dan juga Selat Hormuz (Iran-Oman) karena merupakan lokasi vital bagi pelayaran dan perdagangan dunia yang membutuhkan pengamanan;

3) Nasional

a) Geografi

(1) Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas daratan 1,9 juta km² dan lautan 7,9 juta km³ dengan jumlah pulau 17.504 dan 16.056 telah dibakukan namanya letak geografis Indonesia yang strategis selalu menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Selain itu, Indonesia juga menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia, terutama perdagangan antara negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang. menjadi titik persilangan perdagangan antara Jepang, Korea, Cina dengan negara-negara di Afrika, Australia dan Eropa;

(2) Posisi Indonesia terletak antara Benua Australia dan Benua Asia dan berada pada pertemuan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan pertemuan rangkaian pegunungan sirkum mediterania dan sirkum pasifik. Selain wilayah Indonesia juga berada pada pertemuan tiga lempeng yaitu bagian utara berbatasan dengan tameng Asia yang mengalami perluasan yang dikenal dengan Lempeng Asia, bagian barat dan selatan berbatasan dengan Benua Gondwana India, dasar Samudera Hindia, Australia, dan perluasan yang dikenal dengan Lempeng Indo Australia, dan bagian timur yaitu dasar Samudera Pasifik,

(3) Indonesia memiliki batas wilayah sebelah utara dengan Filipina, Malaysia dan Singapura; sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Timor Leste, sebelah selatan berbatasan dengan Australia, sebelah barat berbatasan dengan

dengan Samudera Indonesia dan Srilangka. Perbatasan darat dengan Timor Leste sepanjang 253 km, dengan Malaysia sepanjang 1,881 km, dan dengan Papua Nugini sepanjang 824 km;

b) Demografi

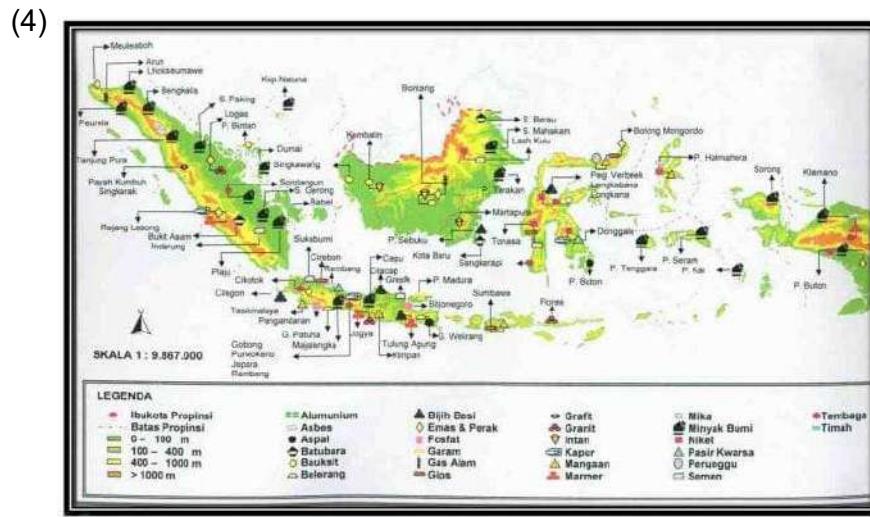
- (1) Indonesia memiliki luas daratan luas daratan Indonesia mencapai 1.919.440 km² yang terbagi dalam 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Berdasarkan sensus 2020, Indonesia memiliki jumlah penduduk 270.203.917 penduduk dengan komposisi laki-laki 136.661.899 (50,6%) dan perempuan 133.542.018 (49,4%);
- (2) Jumlah usia produktif (15-64 tahun) adalah 191.08 juta dengan komposisi generasi x (40-55 tahun) berjumlah 58,65 (21,88%)juta, generasi z (8-23 tahun) berjumlah 74,93 (27,94%) juta dan generasi milenial (24-39 tahun) berjumlah 69,38 juta atau 25,87% sementara jumlah lansia 5,03 juta atau 9,82%;
- (3) Distribusi penduduk tidak merata dan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan penduduk yang mendiami Pulau Jawa mencapai 151,59 juta penduduk atau 56,10 persen penduduk Indonesia. Untuk Pulau Sumatera mencapai 21,68%, Pulau Sulawesi 7,36%, Pulau Kalimantan 6,15%, Bali Nusa Tenggara 5,54% dan Papua 3,17%. Secara rinci sebaran penduduk per provinsi berdasarkan sensus tahun 2020 yaitu sebagai berikut:
- (4) Tingkat kepadatan penduduk Indonesia adalah 141 jiwa per km. Laju pertambahan penduduk 2020 yaitu 1,25% dan melambat dari periode sebelumnya 1,49%;

c) Sumber Daya Alam

Sumber daya alam Indonesia tersebar secara tidak merata. Persebaran sumber daya alam di Indonesia digolongkan menjadi 2, yaitu persebaran sumber daya alam hayati dan persebaran

sumber daya alam barang tambang. Sumber daya alam hayati terdiri dari sumber daya alam hewani dan nabati, yaitu:

- (1) Sumber daya alam nabati, Indonesia dianugrahi tanah yang subur sehingga tumbuhan dapat tumbuh dengan sempurna di wilayah Indonesia. Wilayah flora di Indonesia meliputi hutan tropis, hutan musim, stepa dan sabana;
 - (2) Sumber daya alam hewani, pada umumnya wilayah persebaran fauna di Indonesia dibagi 3 wilayah yaitu wilayah Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, Indonesia bagian Timur.
Ketiganya dibatasi oleh Wallace dan garis Weber. Bagian Barat lebih cenderung mengikuti ragam hewan Asia, sedangkan bagian Timur mengikuti ragam hewan Australia.
Ciri-ciri kasus hewan Indonesia terdapat pada wilayah bagian Tengah;
 - (3) Sebaran hasil tambang, kekayaan tambang Indonesia tersebar secara tidak merata. Peta berikut ini menjelaskan sebaran hasil tambang di Indonesia;



Gambar 2. Sebaran Tambang di Indonesia

Berdasarkan peta tersebut dapat dijelaskan bahwa tambang yang dihasilkan oleh bumi Indonesia dan daerah penghasilnya;

d) Ideologi

d) Ideologi

- (1) Ideologi menjadi persoalan bahkan diperalat sebagai kendaraan untuk kepentingan politik dari pihak-pihak/kelompok-kelompok tertentu. Upaya menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya dilakukan baik melalui jalur politik maupun melalui gerakan-gerakan oleh kelompok radikal. Pemahaman sempit Pancasila sebagai ideologi negara menjadi katalis bagi pertumbuhan/perkembangan ideologi lain yang bertentangan;
- (2) Penyebaran paham ideologi Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) yang masif telah mempengaruhi eksistensi kelompok jaringan terorisme maupun masyarakat yang memiliki pemahaman radikal untuk membangun negara Islam (Khilafah), selaras dengan perjuangan DI/TII untuk membangun Negara Islam Indonesia (NII). Mereka masih bergerak secara klaendestein dan berpotensi mempengaruhi kelompok militan untuk melakukan aksi kekerasan dan persekusi terhadap kelompok sesama umat maupun yang berbeda agama, dengan melakukan aksi persekusi serta kekerasan terhadap masyarakat maupun aparat penegak hukum sebagai sasaran aksi amaliyah;
- (3) Saat ini Indonesia berada di tengah-tengah pertarungan ideologi asing yang bisa mempengaruhi cara pandang masyarakat dan mengancam kebhinekaan yang telah menjadi komitmen bangsa. Ancaman masuknya ideologi asing dapat menggoyahkan ketahanan ideologi nasional, dan berdampak pada kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ideologi itu antara lain ideologi radikal yang membawa semangat pan- islamisme, ideologi komunis yang berupaya mempengaruhi kebijakan negara terhadap kelompok sosial paling bawah (proletar) serta kebijakan ultra nasionalisme AS untuk mendorong imperialisme dan dominasi AS di dunia;

e) Politik

e) Politik

- (1) Pemilu 2024 telah menghasilkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih untuk periode tahun 2024-2029,
- (2) Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2024-2029 akan membentuk Kabinet baru yang diwarnai dengan adanya revisi terhadap koalisi hasil Pemilu,
- (3) Penyesuaian program, kebijakan dan anggaran akan menjadi fokus pemerintahan baru. Hal ini untuk mewujudkan janji politik dan visi Indonesia, sehingga pada tahun 2025 yang merupakan masa transisi masih menggunakan visi periode sebelumnya;
- (4) Potensi munculnya konflik horizontal dalam menyikapi hasil Pemilu 2024 terutama dalam pemilihan Presiden/Gubemur/Bupati/Walikota;
- (5) Perpindahan Ibukota Nusantara, meskipun tetap menjadi fokus 2025, akan menjadi perbincangan hangat. Hal ini erat kaitannya dengan arah pembangunan dan pemerataan dan otonomi daerah;
- (6) Sengketa Pemilu 2024 pasca Pemilu 2024 yang merupakan Pemilu paralel pertama kali yaitu Pemilihan Presiden, Pemilihan DPR RI/DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak dan akan menyisakan sejumlah sengketa. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga gawang, kewibawaannya menurun karena perilaku hakim yang melanggar etik. Kondisi ini dapat memicu adanya konflik horizontal. Oleh sebab itu, dalam rangka menghadapi sengketa Pemilu, Mahkamah Konstitusi harus mempersiapkan hakim yang kredibel. Sengketa yang mungkin berlarut antara lain:
 - (a) Perhitungan suara Pilpres;
 - (b) Perhitungan suara Partai Politik;
 - (c) Perhitungan

- (c) Perhitungan suara Calon Anggota Legislatif;
- (d) Perhitungan suara Gubernur/Bupati/Walikota.

f) Aspek Astagatra

(1) Geografi.

- (a) Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu Provinsi yang berada di Pulau Kalimantan dari 5 (lima) Provinsi yang terletak di ujung selatan Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan Prov. Kaltim dan Prov. Kalteng. Kalsel memiliki 11 Kabupaten dan 2 Kota. Secara situasional Prov. Kalsel dapat dikatakan sangat kondusif mengingat sebagian besar masyarakat Kalsel sangat religius dan menghormati para Alim Ulama, sehingga apabila ada permasalahan dapat diselesaikan dengan Musyawarah dengan Para Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat sehingga terwujudnya Sitkamtibmas yang kondusif;
- (b) Terjadinya La Nina yang lemah hingga sedang berkontribusi pada curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya dan terjadi hampir di seluruh Indonesia, topan Cempaka membawa hujan deras dan angin ekstrim ke laut Jawa sampai ke daratan Kalimantan sehingga dapat meningkatkan resiko banjir di beberapa wilayah dataran rendah Kalsel;
- (c) Kalimantan Selatan memiliki 2 musim, yaitu musim hujan yang blasanya terjadi pada bulan Oktober s/d Mei dan musim kemarau terjadi pada bulan Juni s/d Agustus. Diantara kedua musim terdapat musim pancaroba yang berdampak kekeringan, bencana alam (banjir, longsor, puting beliung, kebakaran / pembakaran hutan) dan kesehatan (muntaber, demam berdarah serta malaria). Kondisi Geografi Wilayah Prov. Kalsel terdiri dari dataran Rendah, Tinggi (Bukit/pegunungan), Rawa, Pantai, Sungai dan Pulau;

(d) Provinsi

- (d) Provinsi Kalimantan selatan secara geografis terletak diantara $114^{\circ} 19' 13''$ - $116^{\circ} 33' 28''$ Bujur Timur, dan $1^{\circ} 21' 49''$ - $4^{\circ} 10' 14''$ Lintang Selatan, dan memiliki luas wilayah hanya 6,98% dari luas pulau Kalimantan atau seluas 37,530,52 Km dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kal-Timur;
 - Sebelah Selatan dengan laut Jawa;
 - Sebelah Timur dengan Laut Makasar;
 - Sebelah Barat dengan Propinsi Kal-Teng.
- (e) Kondisi geografis wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, dan banyaknya jalur alternatif masuk menuju Kalimantan Selatan, merupakan titik rawan sebagai jalur keluar masuknya peredaran gelap narkoba di kota Banjarmasin dan di beberapa Kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Selatan antara lain di Amuntai (Hulu Sungai Utara), Tanjung (Tabalong), Kandangan (Hulu Sungai Selatan), Barabai (Hulu Sungai Tengah), Banjarbaru dan sebagian wilayah Martapura (Banjar).
- (f) Selain Pantai/ laut, sungai di Kalimantan Selatan berperan sebagai salah satu sarana transportasi, bahkan ada yang sampai ke Wilayah Kalimantan Tengah, antara lain ke Kota Buntok, Muara Teweh, Palangkaraya dan Kapuas, selain itu sungai berperan sebagai sarana perdagangan (pasar terapung) yang digunakan masyarakat sekitar sungai Barito dan sungai Martapura antara lain di Kec. Alalak Banjarmasin dan di objek Wisata Siring Menara Pandang Kota Banjarmasin serta di Kel. Lokbaintan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar Kondisi demikian selain menguntungkan Pemerintah Provinsi sebagai dektinasi wisata, juga berpotensi terjadinya kejahatan pada perairan.

(2) Demografi

(2) Demografi.

- (a) Sebagai bangsa yang heterogen Indonesia dengan bermacam-macam suku, budaya, agama dan adat berpeluang terjadinya konflik komunal (SARA). Faktor-faktor keberagaman ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (b) Sebagai negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar dan banyak aliran kepercayaan, Negara Indonesia berpotensi terdapat beberapa masyarakat yang memiliki pemahaman radikal, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dengan melakukan adu domba, penghasutan anti pemerintah sampai aksi teror/terorisme;
- (c) Kalimantan Selatan terdiri 11 Kabupaten dan 2 Kota, 152 Kecamatan serta 2008 desa, luas wilayah 37,530.52 km² dengan Jumlah penduduk Kalimantan Selatan sesuai hasil Pendataan Sensus Penduduk tahun 2020 ± 4.073.584 jiwa dan ditahun 2021 ± 4.122.576 jiwa terdiri dari bermacam suku bangsa dari jumlah penduduk ini jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, maka yang terbanyak jumlah penduduknya berada di Kota Banjarmasin, disusul Kabupaten Banjar dan Tanah Laut sedangkan jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Tapin dan Balangan.
- (d) Berdasarkan data BPS Prov. Kalsel, komposisi penduduk Kalsel dilihat dari suku bangsa terdapat suku pribumi yang merupakan mayoritas dan suku pendatang yang berasal dari suku-suku lain yang berada di wilayah Indonesia serta suku asing. Komposisi penduduk menurut suku yaitu suku banjar sekitar 74,34%, suku Dayak

Dayak 2,23% dan sisanya 23,43% adalah Suku Jawa, suku Bugis, suku Madura, suku Betawi, suku Bali, suku Sunda, suku Bima, suku Maluku / Ambon, suku Tionghoa, suku Minang, suku Toraja, suku Flores, suku Palembang, suku Manado dan suku Buton. Dengan beraneka ragam suku tentunya juga mengakibatkan adat istiadat, ras dan agama yang berbeda dan tentunya berpeluang timbulnya permasalahan sosial, seperti konflik antar suku, agama, ras, dan adat istiadat yang perpotensi mengganggu stabilitas keamanan;

- (e) Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 Kecamatan dan 5 kelurahan serta 214 desa, dengan luas wilayah 915,05 km² dan Jumlah penduduk Hulu Sungai Utara sesuai data dari Badan Pusat Statistik Kab. Hulu Sungai Utara tahun 2024 ± 237.049 jiwa terdiri dari bermacam-macam suku dari jumlah penduduk ini jika dilihat menurut Kabupaten / Kota, maka yang terbanyak jumlah penduduknya berada di Kecamatan Amuntai Tengah, disusul Kecamatan Amuntai Selatan dan Sungai Pandan sedangkan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Paminggir dan Sungai Tabukan.

Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO.	KECAMATAN	JIWA (2024)	RANG KING
1	2	3	4
1.	Amuntai Tengah	52.126	1
2.	Amuntai Selatan	31.962	2
3.	Sungai Pandan	29.220	3
4.	Amuntai Utara	21.688	4
5.	Danau Panggang	21.420	5
6.	Babirik	20.461	6
7.	Banjang	19.061	7
8.	Haur Gading	17.262	8
9.	Sungai Tabukan	15.435	9
10.	Paminggir	8.414	10
JUMLAH		237.049	

Data BPS Kab. HSU Th. 2024

(f) Pertumbuhan

(f) Pertumbuhan penduduk yang relatif cukup tinggi, penyebaran yang masih belum merata dan penduduk yang heterogen dapat berpengaruh terhadap timbulnya permasalahan seperti SARA (Dayak Vs Madura), wabah penyakit, masalah tanah dan lain sebagainya. Adapun jumlah Penduduk Prov. Kalsel menurut agama yang dianutnya adalah Islam 96,67%, Kristen Protestan 1,32%, Katolik 0,64%, Hindu 0,44%, Budha 0,32%, Khonghucu 0,01%, dan lainnya 0,59%. Sedangkan untuk Kab. Hulu Sungai Utara agama yang dianut adalah Islam 99,94%, Kristen Protestan 0,03%, Katolik 0,008%, Hindu 0,008%, Budha 0,002%, dan lainnya 0,0008%

g) Sumber Daya Alam.

- (1) Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya;
- (2) Potensi Sumber daya alam di Kalimantan Selatan sangat berlimpah di mana banyak terdapat sebuah tambang seperti (Emas Batubara Intan dan lainnya), Hutan (Kayu, Rotan dan lainnya, banyaknya bermacam-macam Flora dan Fauna yang hidup Pantai dan Laut, perikanan yang berlimpah).
- (3) Selain sumber alam tersebut Kalimantan Selatan juga memiliki kekayaan alam lain seperti kayu hasil hutan. Kayu hutan yang tumbuh di kawasan hutan lindung sangat bermanfaat bagi penduduk pedalaman yang hidupnya menopang dan berpindah-pindah. Kesuburan tanah lainnya juga sangat bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan, untuk menanam tanaman industri. Sumber alam

kayu

kayu hutan ini juga tidak menutup kemungkinan dikelola dengan tidak baik bahkan banyak terjadi ilegal logging dan pembalakan liar serta maraknya penambangan galian C seperti tanah urug yang berpotensi mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan kekurangan air di musim kemarau karena kurangnya resapan air;

- (4) Sumber daya alam yang terdapat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sangat berpotensi jika dikembangkan yaitu Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan. Dengan adanya sumber daya alam yang cukup berpotensi maka gangguan kamtibmas yang mungkin dapat muncul adalah Pencurian, Penyalahgunaan wewenang serta Korupsi.

h) Aspek Ideologi.

- (1) Pancasila sebagai satu satunya azas telah diterima sebagian besar masyarakat Indonesia, namun dalam pengamalannya masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Disisi lain, di Prov. Kalsel ada sekelompok orang (1 Ormas dan 5 aliran) yang dianggap menentang ideologi Pancasila;
- (2) Sebagian besar masyarakat Kalsel masih sulit dipengaruhi dan cenderung menghindari adanya paham radikal serta aliran menyimpang yang datang dari luar. Di Wilayah Prov. Kalsel terdapat Inti, Pendukung dan simpatisan ISIS dengan total 27 Orang yang terdiri dai Inti sebanyak 15 orang, Pendukung sebanyak 7 orang dan simpatisan sebanyak 5 orang yang tersebar di Kab./Kota Prov. Kalsel;
- (3) Ormas Front Pembela Islam (FPI) setelah dibubarkan oleh Pemerintah, khususnya di Prov. Kalsel mendeklarasikan Front Persaudaraan Islam Kalsel di kediaman HABIB MUHAMMAD ASSEGAF Desa pematang Karang Hilir Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin dengan dihadiri sebanyak 35 orang. Adapun jumlah pengikut FPI (Front Persaudaraan Islam) di Kalimantan Selatan + 145 orang;

(4) Ex

- (4) Ex HTI di Prov. Kalsel masih eksis walaupun sudah dibubarkan tetapi perseorangan masih aktif secara sembunyi. Adapun jumlah anggota ex HTI di Prov. Kalsel yang termonitor masih aktif pada Kota Banjarmasin 16 orang, Kota Banjarbaru 23 orang, Kab. Batola 5 orang, Kab. Tapin 1 orang, Kab. Balangan 6 orang, Kab. HSS 7 orang, Kab. HST 13 orang, Kab. HSU 4 orang, Kab. Tabalong 4 orang, Kab. Tanbu 1 orang dan Kab. Kotabaru 2 orang;
- (5) Khilafatul Muslimin di Prov. Kalsel termonitor ada sebanyak + 43 orang.

i) Aspek Politik.

- (1) hasil Pemilu 2024 telah menghadirkan komposisi baru baik di eksekutif maupun legislatif. Pemerintah mulai adaptif berkoordinasi terkait kelembagaan dan program kebijakan, anggaran dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota, serta masih adanya pengaruh Presiden ke-7 yang berdampak pada dinamika politik tahun 2026;
- (2) harmonisasi, adaptasi penyesuaian program dan anggaran baik nasional maupun daerah karena adanya perubahan prioritas pembangunan nasional. Hal tersebut akan terjadi secara nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota. Penyelesaian terhadap RUU yang belum rampung dan menjawab peraturan perundangan yang dinilai bermasalah akan menjadi konsentrasi pemerintah dan DPR RI. Dimana benturan kepentingan dan adanya *reshuffle* kabinet dan perubahan peta politik pada tahun 2026 akan mewarnai termasuk penyesuaian program, kebijakan dan anggaran akan menjadi fokus pemerintahan baru. Hal tersebut untuk mewujudkan janji politik dan visi Indonesia.

Potensi munculnya konflik horizontal dalam menyikapi penataan hubungan pusat daerah;

j) Aspek Ekonomi.

- (1) perubahan iklim yang berdampak pada daya dukung lingkungan, ekonomi dan sosial, akan menyebabkan ketahanan pangan dan kerentanan sosial ekonomi dan lingkungan;
- (2) Permasalahan tambang galian golongan C tanpa ijin di Hulu Sungai Utara memang sudah sejak lama yaitu Lokasi yang terletak di desa babirik hilir Rt.01 Kec Babirik Kab. Hulu Sungai utara. Kepada para pengusaha galian C tanpa ijin tersebut yang menuntut agar dapat beroperasi, kami menyarankan agar mengurus perizinan tersebut sampai diterbitkan izin oleh pemerintah provinsi, sedangkan dari pihak pengusaha mereka sudah berusaha memperoleh ijin namun dana kepengurusan yang dikeluarkan cukup besar dan tidak sepadan dengan hasil Galian C karena status kegiatan galian tersebut jarang aktif;
- (3) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel) telah memiliki enam kelompok Brigade Pangan untuk mendukung program Asta Cita sektor ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. "Brigade Pangan adalah mereka para petani milineal yang siap mendukung optimalisasi lahan (OPLAH) Kementerian Pertanian. Brigade Pangan akan mendapatkan pendampingan baik dari TNI serta Dinas Pertanian, sesuai dengan arahan Menteri Pertanian, satu kelompok Brigade Pangan terdiri dari 39 GAPOKTAN petani milenial untuk mengelola lahan. "Brigade Pangan akan didukung peralatan pertanian modern untuk menunjang tugasnya pada program optimalisasi lahan. Sudah ada 2 (dua) Mesin Combine Padi besar yang datang guna mendukung program ini,"

harapan....

harapan kedepan program ini dapat berjalan maksimal di Kabupaten HSU sehingga memberikan hasil yang menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat khususnya petani milenial;

- (4) Disisi lain masih terjadi praktik KKN terutama penyelewengan dana desa serta belum terwujudnya secara baik pemerataan perekonomian yang akan terus memperlebar kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat sehingga pada gilirannya membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok anti pemerintah dengan menimbulkan instabilitas ekonomi;
- (5) Pendistribusian dan penggunaan BBM masih menemukan berbagai ganjalan, antara lain kekurangan pasokan minyak, akibat ketergantungan pasokan dari Depo Pertamina Banjarmasin, selain itu masih adanya penyelewengan BBM Subsidi sehingga turut menghambat masyarakat untuk mendapatkan BBM bersubsidi serta belum meratanya suplai BBM oleh Pertamina yang langsung kepulosok – pelosok daerah;
- (6) Destinasi wisata Hulu Sungai Utara yang dapat dikembangkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat, terdata pada tahun 2024 ada 3 (tiga) tempat wisata yang tersebar di wilayah Hulu Sungai Utara diantaranya adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	LOKASI
1.	Candi Agung Amuntai	Jl. Batung Batulis Kel. Sungai Malang
2.	Waterboom Melati	Jl. Abdul Gani Majedi Kel. Paliwara
3.	Siring Patung Itik Amuntai	Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah

k) Aspek Sosial Budaya.

- (1) Keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama dimiliki bangsa Indonesia turut mempengaruhi tatanan kehidupan sosial dimasyarakat,

Pada.....

Pada satu sisi, keanekaragaman komponen bangsa dapat dipandang sebagai potensi nasional membangun bangsa, namun pada sisi lain keanekaragaman tersebut dapat dipandang sebagai potensi konflik yang memicu disintegrasi bangsa;

- (2) Berkembangnya aliran/kepercayaan dalam suatu agama menimbulkan sikap pro-kontra masyarakat menjurus terhadap terjadinya konflik sosial. Pemahaman dan implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik, bahkan mengalami penurunan dan munculnya gejala fanatisme sempit. Sebagian pemuka agama cenderung menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan) sehingga menurunkan penghormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh;
- (3) Masih terjadi aksi kekerasan terhadap sasaran korban warga masyarakat maupun aparat keamanan TNI/Polri dan pengrusakan tempat ibadah, perkantoran pemerintah, rumah pejabat penegak hukum, atau tempat umum lainnya. Mengindikasikan kelompok radikal pelaku teror masih ada dan terus melakukan aksi teror dengan berbagai cara, tetap tumbuh berkembang generasi baru dengan motif bernuansa politik SARA sekaligus sebagai aksi pembalasan atas tindakan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polri;
- (4) Permasalahan tanah diperkirakan masih menjadi faktor utama munculnya konflik sosial masyarakat, meliputi Ketidak jelasan status kepemilikan tanah, Kepemilikan tanah secara ganda/ tumpang tindih kepemilikan, dan Penyimpangan peruntukan atas tanah;
- (5) Terjadinya pembebasan tanah / lahan untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum, sering menimbulkan gejolak massa yang dapat berakhir dengan tindakan anarkhis, akibat proses ganti rugi yang tidak seimbang,

dimana.....

dimana Pemerintah bertindak hanya berdasarkan proses hukum yang cenderung berpihak kepada pengembang maupun Pemerintah itu sendiri;

- (6) Kemajemukan adat istiadat dan budaya daerah selain merupakan potensi pembangunan nasional, juga merupakan potensi konflik. Penguanan identitas kedaerahan atau kesukuan akibat penerapan otonomi daerah dapat mendorong terjadinya konflik sosial terutama dalam ketentuan dan larangan PNS menggunakan cadar dan celana cingkrang serta jenggot, masalah haji, umroh dan penanganan sengketa tempat ibadah serta penyebaran faham yang bertentangan dengan agama yang ada di Indonesia yang bertolak belakang dengan Pancasila dan peraturan perundang-undangan;
- (7) Pembangunan sektor kesehatan masih dihadapkan permasalahan kenaikan iuran BPJS, disparitas status kesehatan, beban ganda penyakit, kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan yang minim, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan, kurangnya pemerataan dan keterjangkauan layanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan, tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan, rendahnya status kesehatan penduduk miskin, serta kendala ketersediaan obat, perbekalan farmasi, dan alat kesehatan. Perilaku masyarakat yang belum peduli terhadap masalah kesehatan telah menyebabkan berkembangnya berbagai wabah penyakit menular, seperti: demam berdarah (DBD), TBC, muntaber, diare, rabies, chikungunya, anthrax, dan lain-lain;
- (8) Kondisi cuaca yang saat ini tidak menentu yang mana terjadi hujan turun dan disertai angin kencang yang mengakibatkan korban angin puting beliung serta panas yang berlebihan

yang.....

yang masih terjadinya Karhutla khususnya daerah lahan gambut;

- (9) Proyek Pembangunan Embung atau kanal – kanal Resapan Banjir di Kab.HSU diharapkan pemerintah sebagai solusi penanggulangan bencana banjir di Kab.HSU, Air yang ditampung tersebut selanjutnya digunakan sebagai irigasi suplementer untuk budidaya komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi (high added value crops) di musim kemarau atau disaat curah hujan makin jarang. Embung merupakan salah satu teknik pemanenan air (waterharvesting) yang sangat sesuai di segala jenis agroekosistem. Di lahan rawa namanya pond yang berfungsi sebagai tempat penampungan air drainase saat kelebihan air di musim hujan dan sebagai sumber air irigasi pada musim kemarau. Sementara pada ekosistem tadah hujan atau lahan kering dengan intensitas dan distribusi hujan yang tidak merata, embung dapat digunakan untuk menahan kelebihan air dan menjadi sumber air irigasi pada musim kemarau. Secara operasional sebenarnya embung berfungsi untuk mendistribusikan dan menjamin kontinuitas ketersediaan pasokan air untuk keperluan tanaman ataupun ternak di musim kemarau dan penghujan, dan saat ini masih banyak pro dan kontra di masyarakat HSU mempertanyakan kegunaan embung atau kanal tersebut, karena dengan adanya fasilitas embung ditegarai berdampak kepada tingginya potensi bencana banjir di wilayah / areal sekitarnya, terutama diperumahan penduduk;
- (10) Pada musim penghujan Setiap tahun bencana alam banjir terjadi di wilayah Kab. Hulu Sungai Utara akibat meluapnya aliran air sungai dan kurangnya sistem drainase, sedangkan pada musim panas lahan gambut rentan dengan terjadinya kebakaran lahan, kondisi ini juga merupakan tantangan pemerintah daerah untuk menanggulanginya.

I) Aspek....

I) Aspek Keamanan.

- (1) Meningkatnya persaingan AS dan Cina berdampak pada meningkatnya aksi-aksi teror, baik secara ekonomi, politik, militer dan budaya;
- (2) Kemenangan Taliban dan kerja sama Tiongkok dengan Taliban telah memancing Timur Tengah dan Rusia untuk ikut dalam percaturan ini;
- (3) Penggunaan senjata dan kekuatan militer tampaknya akan sangat berkurang dan digantikan teknologi dan informasi;
- (4) Letak geografis Indonesia yang mendukung serta meningkatnya kejahatan terhadap narkotika, membuat Indonesia sangat rentan menjadi lokasi penyelundupan maupun penyalahgunaan narkotika;
- (5) Kejahatan siber atau kejahatan melalui jaringan internet menjadi ancaman bagi stabilitas nasional, pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan tersebut yang dilakukan pelaku/ sindikat dengan teknologi jaringan internet dan intranet, muncul beberapa kasus di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, *hacking* beberapa situs dan menyadap transmisi data orang lain sehingga kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil (perbuatan seseorang memasuki komputer orang lain tanpa izin), dan delik materil (perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain);
- (6) Masih terdapat potensi ancaman kejahatan konvensional yang harus tetap diwaspada karena dapat mengganggu sitkamtibmas antara lain masih banyaknya pengangguran, kurangnya lapangan pekerjaan, residivis kambuhan, lemahnya pengamanan lingkungan, ingin mendapatkan sesuatu dengan cara instan, pembalakan liar, penambangan liar, kebiasaan membawa sajam, ketergantungan obat-obatan (daftar G);

(7) Perkembangan.....

- (7) Perkembangan organisasi kejahatan yang didukung kemajuan IPTEK, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi menyebabkan kejahatan bersifat transnasional, seperti peredaran Narkoba dan terorisme yang relatif masih banyak terjadi;
- (8) Kejahatan terhadap Kekayaan Negara seperti korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Negara dan Pihak ketiga juga masih berpotensi terjadi, karena pejabat negara dalam pengelolaan anggaran masih belum atau kurang transparan dan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang atau dari masyarakat;
- (9) Situasi yang mendorong terjadinya permasalahan yang Berimplikasi Kontijensi antara lain isu SARA, perebutan wilayah yang menghasilkan sumber daya alam, bencana alam seperti karhutla, serta pengrusakan tempat - tempat ibadah (intoleransi);
- (10) Selain kejahatan Siber seperti tersebut diatas juga adanya potensi tindak pidana yang dilakukan melalui sosial media seperti pornografi, pencemaran nama baik baik bersifat person maupun mengarah pada pemerintah yang tidak menutup kemungkinan mengganggu stabilitas nasional.
- (11) Masih rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melakukan Pengamanan Swakarsa.
- (12) Berkaitan dengan aksi terorisme dan radikalisme, ditinjau dari karakteristik daerah dan masyarakatnya yang cenderung agamis serta rentan / mudah terpengaruh dengan isu-isu yang mengatasnamakan agama maka Kabupaten Hulu Sungai Utara berpeluang masuknya faham radikalisme, mengindikasikan adanya potensi ancaman terorisme.
- (12) Peredaran Narkoba Jenis Sabu-sabu dan obat-obatan terlarang jenis Zenith (Charnophen) di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup meresahkan,

upaya.....

upaya pemberantasan terus dilakukan dengan melalui Operasi Khusus dan Operasi Rutin oleh Polres Hulu Sungai Utara, baik dalam bentuk penindakan maupun pembinaan.

b. Analisis SWOT.

Pelaksanaan tugas Polres Hulu Sungai Utara masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari "*faktor internal dan eksternal*" sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisis agar dapat ditemukan langkah yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi. Polres Hulu Sungai Utara yang saat ini memiliki personel mulai dari Polres sampai ke tingkat Polsek yang telah didukung oleh sarana dan prasarana yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polri dalam melaksanakan tugasnya, sehingga berdampak akan diusulkannya kembali untuk kenaikan tunjangan kinerja Polri menjadi 80%.

Adapun kondisi eksternal yang dihadapi antara lain: gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat dan waktu, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (kejahatan Siber). Masih dijumpai adanya kecenderungan masyarakat dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri, sehingga berdampak buruk terhadap penegakan dan kepastian hukum. Trend peningkatan 4 jenis kejahatan menuntut Polres Hulu Sungai Utara untuk lebih optimal di bidang pencegahan dan penegakan hukum. Pemahaman sistem hukum dan peradilan yang terkait kewenangan antar lembaga penegak hukum menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum di Hulu Sungai Utara. Semakin meningkatnya kejahatan transnasional terkait dengan semakin tidak terkontrolnya lalu lintas orang dan barang ilegal semakin mudah dan cepat masuk ke Hulu Sungai Utara.

1) Faktor Internal.

a) Kekuatan.

(1) Letak.....

- (1) Letak Mapolres Hulu Sungai Utara yang berada di jantung kota Amuntai sebagai ibu kota Kab. Hulu Sungai Utara strategis dalam menanggulangi gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah perkotaan/ Kecamatan Amuntai Tengah ataupun mem-backup Kecamatan lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara dikarenakan jarak yang relatif tidak terlalu jauh;
- (2) Kekuatan personil Polres Hulu Sungai Utara 375 orang yang terdiri dari Perwira Menengah 4 orang, Perwira Pertama 36 orang, Brigadir 311 orang dan Pegawai Negeri Sipil 24 orang;
- (3) Untuk mendukung pemerintah, meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE), hal tersebut dibuktikan dengan adanya Aplikasi berbasis IT dalam pelaksanaan tugas, dan dalam melakukan pelayanan publik terdapat beberapa terobosan kreatif (*creative Breakthrough*) berbasis Teknologi informasi yang telah di buat;
- (4) Jumlah sarana dan prasarana Polres Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

(a) Daftar Persenjataan

NO.	JENIS MATERIIL	JML	KONDISI		KET
			SP	LP	
1.	Senpi Genggam (Rev)	117	-	117	
2.	Pistol	32	-	32	
3.	Senpi Bahu	12	-	12	
4.	Senpi Pinggang	-	-	-	
5.	SMR	-	-	-	
6.	Senpi Sandang	39	-	39	
TOTAL		200	-	200	

(b) Daftar.....

(b) Daftar Ranmor, Ran Air, Alsus kondisi layak pakai

NO.	JENIS MATERIIL	JML	KONDISI		KET
			SP	LP	
1.	Ranmor				
	a. R-2	175	-	175	
	b. R-4	22	-	22	
	c. R-6	7	-	7	
2.	Ran Air				
	a. Kapal	4	-	4	
	b. Speed Boat	3	-	3	
	c. Perahu Karet	-	-	-	
	d. Klotok	-		-	
3.	Alkom	307	-	307	
4.	Alsus	334	-	334	
5.	Alkes	255	-	255	
	TOTAL	1.107	-	1.107	

(5) Dukungan anggaran Polres Hulu Sungai Utara berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 42.719.957.000,- (*empat puluh dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) terdiri dari :

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 28.880.780.000,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan;
- Belanja Barang sebesar Rp. 13.839.177.000,- (tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

b) Kelemahan.

(1) Kesatuan Kepolisian Kewilayahan tingkat Polsek di Polres Hulu Sungai Utara pada bulan Desember tahun 2024 sebanyak 7 Polsek pada wilayah kecamatan, apabila dibandingkan dengan jumlah kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berjumlah 10, masih kurang 3 Polsek yang akan berdampak kurang optimalnya pelayanan Polri terhadap masyarakat;

(2) Dilihat.....

- (2) Dilihat dari DSP Polres Hulu Sungai Utara dan jajaran per Juni 2025 adalah sebanyak 952 orang sedangkan Ril personil Polres Hulu Sungai Utara dan jajaran sebanyak 375 orang masih terdapat kekurangan personil sebanyak 577 orang atau baru terpenuhi sebesar 38,34%;
- (3) Belum terpenuhinya satu Bhabinkamtibmas satu desa yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal dan sampai saat ini per tanggal 1 Desember 2024 tercatat 38 Bhabinkamtibmas, hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah desa/ kelurahan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mencapai 219 desa/ kelurahan;
- (4) Masih terdapat sarana dan prasarana pendukung di bidang operasional yang memiliki kondisi usia pakai terlalu lama / tua sehingga membutuhkan biaya perawatan;
- (a) Daftar Persenjataan yang tidak layak pakai

NO.	JENIS MATERIIL	JML TLP	KET
1.	Senpi Genggam (Rev)	1	
2.	Pistol	-	
3.	Senpi Bahu	-	
4.	Senpi Pinggang	-	
5.	SMR	-	
6.	Senpi Sandang	-	
TOTAL		1	

- (b) Daftar Ranmor, Ran Air, Alsus yang kondisi tidak layak pakai

NO.	JENIS MATERIIL	JML TLP	KET
1.	Ranmor		
	a. R-2	17	
	b. R-4	4	
	c. R-6	-	
2.	Ran Air		
	a. Kapal	-	
	b. Speed Boat	1	
	c. Perahu Karet	1	
	d. Klotok	1	
3.	Alkom	-	
4.	Alsus	-	
5.	Alkes	-	

Sumber : Bag Log Polres HSU

(5) Kultur.....

- (5) Kultur budaya organisasi Polri belum menunjukkan kemajuan yang optimal, terindikasi masih adanya oknum anggota Polri yang melakukan tindakan kontra produktif baik yang menyangkut pelanggaran disiplin, etika profesi maupun tindak pidana sehingga membuat citra negatif pada institusi Polri;
- (6) Pelayanan Polri kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan baik dari kualitas maupun kuantitas yang perlu didukung oleh sarana dan prasarana memadai dengan dukungan Teknologi Informasi, sedangkan untuk aplikasi pelayanan publik yang sudah berjalan bahkan tidak berkembang dan tidak dipelihara dengan baik;
- 2) Faktor Eksternal
- a) Peluang.
- (1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD serta unsur TNI di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menjaga dan memelihara stabilitas Kamtibmas semakin baik dan saling mendukung;
- (2) Adanya peningkatan dalam penilaian hasil evaluasi AKIP Polri Tahun 2024 Polres Hulu Sungai Utara mendapat kategori BB (73,10) akan berdampak pada kenaikan tunjangan kinerja Polri saat ini.
- (3) Program Reformasi Birokrasi yang secara terus-menerus berkelanjutan merupakan upaya percepatan Pencegahan Korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan memberikan peluang bagi Polri yang mencangkup aspek struktural, instrumental dan khususnya aspek kultural, hal ini terwujud dari pencapaian Satker Polda Kalimantan Selatan yang telah mendapat predikat WBK dan WBBM dari Permenpan RB hingga bulan Desember 2021 berjumlah 16 Satker dan Satwil yang memperoleh predikat WBK / WBBM.

Untuk.....

Untuk Polres Hulu Sungai Utara telah mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Permenpan RB, pada tanggal 28 Desember 2018 bersama 6 (enam) Satker Polda Kalsel lainnya seperti Ditlantas Polda Kalsel, Polres Tanah Laut, Polres Banjarbaru, Polres Tanah Bumbu, Polres Banjar dan Polres Tabalong.

- (4) Peran serta dan dukungan tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat/suku, tokoh pemuda/wanita), LSM, Organisasi Masyarakat, Intelektual dan Media massa di Polres Hulu Sungai Utara dalam mewujudkan Kamtibmas, hal ini berdampak kepada semakin baiknya dukungan terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian;
- (5) Tuntutan, harapan serta kontrol sosial masyarakat maupun media massa terhadap peningkatan pelayanan Polri menjadi faktor pendorong bagi Polri untuk melaksanakan tugas dengan baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.

b) Ancaman.

- (1) Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat dan waktu, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.
- (2) Kecenderungan masyarakat dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri, sehingga berdampak buruk terhadap penegakkan dan kepastian hukum;
- (3) Tren peningkatan 4 jenis kejahatan menuntut Polri untuk lebih optimal di bidang pencegahan dan penegakkan hukum;
- (4) Pemahaman sistem hukum dan kewenangan antar lembaga penegak hukum yang kurang baik menimbulkan kekacauan dalam penegakkan hukum perlu diperdebatan;
- (5) Semakin meningkatnya kejahatan transnasional terkait

dengan.....

dengan semakin banyaknya pelabuhan gelap/ ilegal sehingga lalu lintas orang dan barang ilegal semakin mudah dan cepat untuk dilakukan, terutama kejahatan narkoba.

2. Identifikasi Masalah.

Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja Polres Hulu Sungai Utara dan pelayanan di bidang Kepolisian semakin mengharuskan Polri untuk menyusun berbagai upaya dan aksi konkret yang efektif dalam mewujudkan Kamdagri, secara umum permasalahan di bidang keamanan yang dihadapi Polri di wilayah Polres Hulu Sungai Utara pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Berkaitan dengan kondisi internal:

- 1) DSP personil jajaran Polres Hulu Sungai Utara sesuai Restrukturisasi Polri tingkat Polres sampai dengan Polsek sebanyak 952 orang sedangkan riil personil Polri jajaran Polres Hulu Sungai Utara sebanyak 375 orang sehingga mengalami masih banyak kekurangan personil yaitu 577 orang;
- 2) Personel Polres Hulu Sungai Utara dengan jumlah penduduk Hulu Sungai Utara Sampai dengan Desember 2024 perbandingan antara Polri dengan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara 1 : 632,13 belum memenuhi target ideal untuk pelaksanaan tugas;
- 3) Kemampuan personil Polres Hulu Sungai Utara yang belum semuanya menguasai teknologi informasi;
- 4) Masih terbatasnya sumber daya manusia Polri Polres Hulu Sungai Utara yang profesional dan ahli dibidangnya;
- 5) Dari 7 (tujuh) Polsek di Polres HSU, masing-masing Polsek sekarang sudah memiliki Rumah Dinas Kaporsek. Namun untuk Rumah Dinas (Asrama) personil Polsek masih kurang sehingga Personil banyak yang bertempat tinggal di luar asrama, mengakibatkan untuk mobilisasi personil bila diperlukan dapat menjadi terkendala;
- 6) Kesejahteraan personel Polri masih terbatas sehingga memerlukan peningkatan pemenuhan rumah dinas, pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi personel Polri secara bertahap;

7) Kualitas.....

- 7) Kualitas pelayanan publik dan kinerja Polri masih perlu ditingkatkan melalui pelaporan dan pelayanan publik yang berbasis teknologi dan meniadakan pungutan liar;
 - 8) Kurang efektifnya dalam mendukung perkembangan teknologi informasi berupa pengembangan aplikasi guna pelaksanaan kinerja Polri dikarenakan pada pelaksanaannya, personel yang mengawaki/operator aplikasi dimaksud mayoritas adalah personel yang mengawaki double aplikasi;
 - 9) Belum terpenuhinya Kesatuan Kewilayahan Kepolisian satu Kecamatan satu Polsek dan satu desa satu Bhabinkamtibmas yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal.
- b. Berkaitan dengan kondisi eksternal:
- 1) Transformasi digital menjadi pendorong penting dalam respons pasca pandemi, sementara juga memungkinkan kelangsungan layanan dan aktivitas ekonomi tertentu secara virtual. Perubahan kebiasaan seperti bekerja dan belajar jarak jauh juga menjadi norma bagi sebagian besar masyarakat;
 - 2) Percepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Polres Hulu Sungai Utara untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber;
 - 3) Perang dagang dan tarif yang terjadi saat ini antara AS dan Cina berpengaruh pada perdagangan dunia;
 - 4) Penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang semakin mengganggu stabilitas dan keamanan;
 - 5) Proses globalisasi dan kemajuan Iptek menghadirkan berbagai ancaman baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya yang perlu diantisipasi;
 - 6) Peredaran Narkoba, kejahatan korupsi semakin marak dan telah meresahkan masyarakat;
 - 7) Kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak yang perlu penanganan khusus;
 - 8) Kejahatan korupsi masih akan terus terjadi selama proses pengadaan barang dan jasa masih belum transparan dan masih adanya kepentingan;

9) Transformasi

- 9) Transformasi digital dan kesenjangan digital masyarakat akan menimbulkan informasi asimetris yang berakibat pada segregasi, konflik dan kekerasan;
- 10) Masih tingginya indikator kriminalitas dengan kemampuan penyelesaian yang relatif masih rendah, disamping itu masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat Hulu Sungai Utara dalam rangka mewujudkan Sitkamtibmas yang kondusif;
- 11) Penyesuaian program, kebijakan dan anggaran serta penataan lembaga negara menjadi fokus pemerintah 2026.

II. Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi.

a. Visi dan Misi Polda Kalimantan Selatan.

1) Visi Polda Kalimantan Selatan.

“Terwujudnya Kalimantan Selatan Maju yang Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat.”

2) Misi Polda Kalimantan Selatan.

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat di Daerah hukum Kalimantan Selatan.”

b. Visi dan Misi Polres Hulu Sungai Utara.

1) Visi Polres Hulu Sungai Utara.

“Terwujudnya Hulu Sungai Utara Maju yang Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat.”

2) Misi Polres Hulu Sungai Utara.

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat di Daerah hukum Hulu Sungai Utara.”

2. Tujuan Jangka Menengah.

a. Adapun tema pembangunan Polda Kalimantan Selatan Tahun 2026 adalah “Polda Kalimantan Selatan Siap Mendukung Program Kedaulatan

Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif" dengan tujuan:

- 1) menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil dan tertib dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara Responsif dan Prediktif;
- 2) meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri yang berintegritas, modern dan akuntabel dengan mengutamakan keadilan, transparasi dan perlindungan hak asasi manusia serta mampu menjalankan peran utamanya dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan negara dengan cara yang lebih profesional, responsif dan adaptif;
- 3) meningkatkan kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polri agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional, berintegritas dan adaptif melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;
- 4) membangun dan mengembangkan infrastruktur strategis Kepolisian yang mendukung operasional kepolisian yang efisien dan terintegrasi, pemeliharaan Kamtibmas yang optimal pelayanan publik yang berkualitas, penegakkan hukum yang lebih professional sehingga dapat mendukung kinerja Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal;
- 5) memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Polri.

b. Tujuan Jangka Menengah Polres Hulu Sungai Utara.

Adapun tema pembangunan Polres Hulu Sungai Utara Tahun 2026 adalah "Polres Hulu Sungai Utara Siap Mendukung Program Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif" dengan tujuan:

- 1) menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil dan tertib dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara Responsif dan Prediktif;
- 2) meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri yang berintegritas, modern dan akuntabel dengan mengutamakan keadilan, transparasi dan perlindungan hak azasi manusia serta mampu menjalankan peran utamanya.....

utamanya dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan negara dengan cara yang lebih profesional, responsif dan adaptif;

- 3) meningkatkan kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polri agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional, berintegritas dan adaptif melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;
- 4) membangun dan mengembangkan infrastruktur strategis Kepolisian yang mendukung operasional kepolisian yang efisien dan terintegrasi, pemeliharaan Kamtibmas yang optimal pelayanan publik yang berkualitas, penegakkan hukum yang lebih professional sehingga dapat mendukung kinerja Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal;
- 5) memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Polri.

3. Sasaran Prioritas.

a. Sasaran Prioritas Polda Kalimantan Selatan

Berdasarkan Sasaran Prioritas Polri Tahun 2026 yang mengacu Surat Edaran Kapolri tentang Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2025, maka sasaran prioritas Polda Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) **pertama** “Menjaga dan Memelihara Kamtibmas di seluruh Wilayah Kalimantan Selatan secara Responsif dan Prediktif”;
- 2) **kedua** “Mewujudkan Pelayanan Publik Polda Kalimantan Selatan yang Berkualitas dan Terintegrasi”;
- 3) **ketiga** “Menegakkan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan”;
- 4) **keempat** “Mewujudkan SDM Polda Kalimantan Selatan yang Profesional, Cerdas dan Berintegritas melalui Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan”;

5) kelima.....

- 5) **kelima** “Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Terintegrasi dalam Mendukung Operasional Kepolisian”;
- 6) **keenam** “Meningkatkan dan Mewujudkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Rangka Memperkuat Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik”.

b. Sasaran Prioritas Polres Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan Sasaran Prioritas Polda Kalimantan Selatan Tahun 2026, maka sasaran prioritas Polres Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

- 1) **pertama** “Menjaga dan Memelihara Kamtibmas di seluruh Wilayah Hulu Sungai Utara secara Responsif dan Prediktif”;
- 2) **kedua** “Mewujudkan Pelayanan Publik Polres Hulu Sungai Utara yang Berkualitas dan Terintegrasi”;
- 3) **ketiga** “Menegakkan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan”;
- 4) **keempat** “Mewujudkan SDM Polres Hulu Sungai Utara yang Profesional, Cerdas dan Berintegritas melalui Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan”;
- 5) **kelima** “Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Terintegrasi dalam Mendukung Operasional Kepolisian”;
- 6) **keenam** “Meningkatkan dan Mewujudkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Rangka Memperkuat Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik”.

III. Arah Kebijakan dan Strategi

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalimantan Selatan Tahun 2026.

- a. Sasaran Prioritas I “Menjaga dan Memelihara Kamtibmas di Seluruh Wilayah Kalimantan Selatan secara Responsif dan Prediktif” terdiri dari 9 (sembilan) arah bijak sebagai berikut:
 - 1) meningkatkan kinerja Polda Kalimantan Selatan sebagai bagian dari.....

dari penguatan fungsi intelijen dalam melaksanakan deteksi aksi dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;

- 2) meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan Kalimantan Selatan melalui mengoptimalkan pengumpulan data intelijen;
- 3) mengendalikan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang responsif;
- 4) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan "Pemolisian Prediktif" dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;
- 5) mengedepankan penanganan konflik ditengah masyarakat secara humanis;
- 6) meningkatkan kegiatan Kamseltibcarlantas kepada masyarakat guna memberikan rasa aman saat berkendara, terjadi kemacetan dan saat pada jam rawan kejahatan;
- 7) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri ditengah masyarakat baik di wilayah bencana dan "*Slum Area*";
- 8) melaksanakan tahapan pengamanan kegiatan *event* nasional/internasional serta pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun 2026;
- 9) melaksanakan "*back up*" kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan dan bencana;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kinerja Polda Kalimantan Selatan sebagai bagian dari penguatan fungsi intelijen dalam melaksanakan deteksi aksi dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan

lingkungan dalam negeri guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan kegiatan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi: deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini dari fungsi intelijen keamanan Polda Kalimantan Selatan melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen yang mampu mendukung operasional fungsi kepolisian baik terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata serta menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial ditengah masyarakat; (*giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU7*);

b) mengoptimalkan kegiatan penyelidikan dengan fokus pada potensi terjadinya tindak pidana terorisme, ancaman aksi radikalisme dan pemetaannya;

(*giat3143/progLidikSidik/SP1/SS2/IKU8*);

c) penguatan program Polmas guna menumbuh kembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*);

(*giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);

d) meningkatkan kualitas hasil penelitian dan survei yang akuntabel dalam rangka mendukung pengukuran Indeks Kamtibmas Polri;

(*giat5067/progDukma/SP1/SS5/IKP1*);

2) arah bijak: meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan Kalimantan Selatan melalui mengoptimalkan pengumpulan data intelijen;

untuk

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) mengoptimalkan pengumpulan data intelijen/informasi dengan mengembangkan repositori data terpadu yang mengintegrasikan berbagai sumber *input*; (*giat3112/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU7*);
 - b) meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui *data-sharing platform* (termasuk notifikasi potensi ancaman kepada fungsi terkait); (*giat3112/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU7*);
- 3) arah bijak: mengendalikan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang responsif;

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan dan mengembangkan program berorientasi masyarakat (*community-based program*) untuk menyelesaikan masalah (*problem solving*) dan mencegah kejahatan secara kolaboratif dalam pemecahan masalah yang terjadi ditengah masyarakat; (*giat3114,3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
- b) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan pencegahan berupa: kontra radikal, kontra narasi dan kontra ideologi terhadap penyebaran propaganda kelompok terorisme baik pada kanal-kanal media *online* maupun komunitas masyarakat yang rentan terpapar oleh paham radikalisme dan terorisme; (*giat3143/progLidiksidik/giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU9*);
- c) meningkatkan dan menciptakan pendekatan adaptif kepada masyarakat dengan melibatkan peran *civil society* dan tokoh agama yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme; (*giat3143/progLidikSidik/giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU9*);
- d) melaksanakan

- d) melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kolaborasi dengan “stakeholder” dalam upaya pencegahan paham radikalisme, terorisme dan melaksanakan pembinaan terhadap eks napi terorisme beserta keluarganya;
(giat3143/progLidikSidik,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU9);
- e) meningkatkan kegiatan menetralisir informasi negatif ditengah masyarakat yang dapat mengganggu Kamtibmas dengan mengelola opini publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
(giat3149/progDukma/SP1/SS5/IKP7);
- f) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan “edukasi” dan himbauan kepada masyarakat berupa pesan Kamtibmas untuk pencegahan kejahatan melalui produksi *konten kreatif*, melaksanakan *press release* tentang Kamtibmas dengan tujuan meningkatkan citra positif terhadap Polri;
(giat3070,3149/progDukma/SP1/SS5/IKP7);
- g) meningkatkan kegiatan patroli yang adaptif di wilayah rawan kejahatan dan kriminalitas serta melaksanakan pelacakan dan penangkalan di tempat Obvit/Obvitnas dan destinasi pariwisata;
(giat3130,3131,5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5);
- 4) arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan kegiatan “*Pemolisian Prediktif*” dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya guna menumbuh kembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan

prinsip

- prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*);
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
- b) peningkatan kegiatan pemberdayaan pengembangan kewenangan fungsi kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus;
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
- c) meningkatkan kegiatan pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan Polmas dan asistensi bagi penguatan KBPPP;
(*giat3133,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
- a) meningkatkan pelaksanaan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas kepada masyarakat pengguna jalan;
(*giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
- 5) arah bijak: mengedepankan penanganan konflik ditengah masyarakat secara humanis;
untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan peran dari para Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis;
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
- b) meningkatkan kegiatan mengorganisasikan masyarakat untuk mengalihkan potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang bersifat positif;
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
- c) meningkatkan respon cepat penggelaran pasukan Korbrimob Polri dalam pengamanan konflik yang dilakukan secara humanis pada saat dan pasca konflik;
(*giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6*);
- 6) arah bijak: meningkatkan kegiatan Kamseltibcarlantas kepada masyarakat guna memberikan rasa aman saat berkendara, terjadi kemacetan dan saat pada jam rawan kejahatan;
untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan

- a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan kepolisian yang adaptif dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli ditengah masyarakat;
(giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3);
 - b) meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan yang adaptif di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan kejahatan serta berperan aktif mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas;
(giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3);
 - c) meningkatkan kegiatan patroli dan penjagaan yang adaptif di Obvit/Obvitnas dan tempat destinasi pariwisata saat jam-jam rawan dalam rangka mendukung “Akselerasi Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” serta berperan aktif ditengah masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;
(giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5);
- 7) arah bijak: meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri ditengah masyarakat baik di wilayah bencana dan “*Slum Area*”; untuk mewujudkan arah bijak 7, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan kesiapsiagaan personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi “ketanggapsegeraan” dalam penanggulangan bencana, keselamatan dan reintegrasi serta di wilayah rawan kriminalitas yang berintensitas tinggi, bencana serta wabah;
(giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6);
 - b) meningkatkan dukungan penyelenggaraan dan pelayanan bantuan penanganan SAR terbatas dalam penanggulangan bencana dan keselamatan yang dilaksanakan oleh personel Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa;
(giat3130,5081,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3);
 - c) meningkatkan

- c) meningkatkan akurasi dalam memetakan desa/wilayah rawan gempa, bencana dan Banjir oleh “*Bhabinkamtibmas*” yang wilayah didiami oleh masyarakat guna memudahkan identifikasi masyarakat yang menjadi korban saat dan pasca bencana;
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);
 - d) meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam penanganan “pelayanan Kesehatan” dan “*trauma healling*” pada daerah rawan gempa dan bencana;
(giat3072,progDukma,giat3110,progProfesionalismeSDM/SP1/SS1/IKU2/SS3/IKP1);
- 8) arah bijak: melaksanakan tahapan pengamanan kegiatan *event* nasional/internasional serta pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun 2026;
- untuk mewujudkan arah bijak 8, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan respon yang cepat dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan intensitas tinggi serta mengoptimalkan penggunaan kekuatan Brimob Polda Kalimantan Selatan dan fungsi Kepolisian lainnya yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
(giat5079,5080,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6);
 - b) melaksanakan perencanaan operasi kepolisian dalam rangka pengamanan *event* nasional/internasional dan regional tahun 2026; *(giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8);*
 - c) melaksanakan kegiatan pengamanan nasional/internasional tahun 2026 meliputi: Pengaturan, Patroli, Penjagaan, Pengawalan; *(giat,3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8);*
 - d) menyelenggarakan pengamanan objek vital di lokasi *event*; *(giat3130,3131,3135/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5);*
- e) melaksanakan

- e) melaksanakan pengamanan *event* nasional tahun 2026 serta mengantisipasi meningkatnya kejahatan yang berskala ke intensitas tinggi;
(*giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6*);
- 9) arah bijak: melaksanakan “*back up*” kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan dan bencana;
untuk mewujudkan arah bijak 9, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan koordinasi kesiapan dari personel Polda Kalimantan Selatan agar mampu digerakkan secara cepat dalam rangka “*back up*” wilayah rawan konflik;
(*giat3130,5076,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);
 - b) meningkatkan sinergisitas dalam membangun kerja sama dengan satuan kewilayahan serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban Kalimantan Selatan yang kondusif;
(*giat5076,5087,5080/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);
 - c) meningkatkan pelaksanaan “*back up*” pengamanan kegiatan ditengah masyarakat yang sedang beraktivitas;
(*giat3130,3131,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);
 - d) meningkatkan pelaksanaan “*back up*” kegiatan pengamanan di kawasan obvitnas dan objek tertentu;
(*giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5*);
 - e) meningkatkan pelaksanaan “*back up*” pelayanan pelacakan dan penangkalan di daerah rawan kejahatan dan bahaya narkoba; (*giat5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);
- b. Sasaran Prioritas II “Mewujudkan Pelayanan Publik Polda Kalimantan Selatan yang Berkualitas dan Terintegrasi”, terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:
- 1) meningkatkan

- 1) meningkatkan dan menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat secara multimoda;
- 2) meningkatkan dan melanjutkan pelayanan yang adaptif dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri;
- 3) meningkatkan “*ketanggap segeraan*” dalam melayani masyarakat baik dalam pelayanan public Polda Kalimantan Selatan, harkamtibmas dan penegakan hukum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan dan menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat secara multimoda; untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan layanan pengaduan berbasis *hotline, website* atau *media sosial* guna meningkatkan citra Polri yang responsif dan tidak *berbelit-belit*;
(giat3071/progDukma/SP2/SS5/IKU7);
 - b) meningkatkan kolaborasi dalam penanganan pelayanan pengaduan guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat saat menyampaikan keluhannya;
(giat3089,3091,5086/progLidikSidik,Dukma/SP2/SS2/IKU9/SS5/IKP7);
- 2) arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan pelayanan yang adaptif dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri; untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan pelayanan *Online* yang terintegrasi serta adaptif dalam pelayanan dikantor pelayanan/keliling di bidang lalu lintas yang lebih menjangkau masyarakat serta pelayanan identifikasi sebagai

- sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian;
(*giat3133/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1*);
- b) meningkatkan kegiatan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor;
(*giat3133/progHarkamtibmas/giat3071,5055/progDukma/SP2/SS1/IKU1*);
- c) meningkatkan inovasi layanan yang adaptif bagi masyarakat serta efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal di lokasi *afirmatif* (menguatkan) di kawasan perbatasan;
(*giat3133,3071,3084,5055/progHarkamtibmas,progDukma/SP2/SS1/IKP4b*);
- d) meningkatkan *update* informasi dan dokumentasi pada layanan/laman website *humaspoldakalsel.go.id* secara berkala guna meningkatkan citra positif Polri dimata masyarakat;
(*giat3149/progDukma/SP2/SS5/IKP7*);
- e) meningkatkan inovasi dan perbaikan yang adaptif dalam memberikan pelayanan intelkam dan optimalisasi sistem pelayanan SKCK *online*;
(*giat3112/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU11*);
- f) meningkatkan kegiatan penilaian atas kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Urkes jajaran;
(*giat3072/progDukma/SP2/SS1/IKU*);
- g) meningkatkan kegiatan *Binmas Online System (BOS)* dengan *Online Single Submission (OSS)* dalam memberikan respon cepat atas penerbitan surat ijin operasional BUJP;
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU2*);
- 3) arah bijak: meningkatkan “*ketanggap segeraan*” dalam melayani masyarakat baik dalam pelayanan publik Polri, harkamtibmas dan penegakkan hukum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP); untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- 1) melanjutkan

- a) melanjutkan, melaksanakan Monev dan terus mengkaji guna merespon aturan/SOP dipelayanan publik yang berbelit-belit;
(giat4339,4340,5053/progDukma/SP2/SS5/IKP4);
 - b) meningkatkan “*Respon Time*” dalam kesiapan untuk memberikan bantuan teknis Satwa dalam melakukan pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban;
(giat5081/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU3);
 - c) meningkatkan dan merespon pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu yang lebih adaptif melalui pembinaan teknis dan audit;
(giat3130,3131/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU5);
- c. Sasaran Prioritas III “Menegakkan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan” terdiri dari 4 (empat) arah bijak sebagai berikut:
- 1) mengedepankan kolaborasi dan Kerjasama antar penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
 - 2) meningkatkan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik Polri;
 - 3) meningkatkan dan mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
 - 4) meningkatkan peran adaptivitas penanganan kejahatan Polri melalui pusat analisis tindak kejahatan dipusat data dan informasi kriminal nasional;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) Arah bijak: mengedepankan kolaborasi dan Kerjasama antar penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat; untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 11 (sebelas) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan

- a) meningkatkan kolaborasi dan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Indonesia; (*giat3134,4342/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU7*);
- b) meningkatkan kegiatan penyelidikan dari ancaman tindak pidana terorisme, dan melaksanakan penindakan serta penyidikan terhadap tindak pidana terorisme berdasarkan penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (*giat3143/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU8*);
- c) meningkatkan kegiatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dengan serta tindak pidana siber, judi *online*, penyelundupan barang, korupsi (pencegahan dan *asset recovery*), Narkoba, terorisme, Karhutla/LH serta siber termasuk kejahatan TPPO dan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (*giat3140,3142,3143,3144,3151,3145,3146,5083,progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/IKU3/IKU4*);
- d) meningkatkan kegiatan penegakan hukum terhadap kejahatan perekonomian dibidang pangan, pertanian, energi, investasi/perbankan (sektor keuangan); (*giat3142,3145,5083/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU4*);
- e) melaksanakan kegiatan penindakan tindak pidana di perairan dalam mendukung kegiatan keamanan laut; (*giat4342/progSidikLidik/SP3/SS2/IKU7*);
- f) melaksanakan kegiatan penanganan/penindakan tindak pidana dan pelanggaran Lalu Lintas dalam rangka mewujudkan “Road Safety” serta penegakkan hukum melalui “ETLE” dan tilang manual; (*giat3133/progHarkamtibmas,4343/progSidikLidik/SP3/SS1/ IKU1/SS2/IKU6*);
- g) melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara melalui “*Restorative Justice*” yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan; (*giat3142/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);
- h) meningkatkan

- h) meningkatkan penanganan kejahatan di ruang siber (*cyber crime*) yang mengedepankan kualitas serta mengedukasi masyarakat;
(giat3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2);
 - i) melaksanakan penindakan hukum terbatas/tipiring dalam menjaga Harkamtibmas;
(giat3130/progHarkamtibmas/SP3/SS2/IKUb);
 - j) meningkatkan dan mempercepat penyelesaian perkara-perkara secara responsif guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat;
(giat3142,3143,3144,3145,3146,3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU9);
 - k) meningkatkan pemberian bantuan teknis penyidikan dalam rangka pengolahan TKP dan pemeriksaan Barang Bukti;
(giat3140,3141/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);
- 2) arah bijak: meningkatkan dan mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat; untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) mengoptimalkan pelaksanaan pemberian SP2HP2 kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir *komplain* dari masyarakat kepada Polri dibidang penegakan hukum dan menjunjung tinggi HAM sebagai bentuk pelayanan kepada pelapor/korban dan tersangka;
(giat3137,5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU9);
 - b) mengoptimalkan peran “*Waskat*” dari atasan penyidik dan peran dari wassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU1/IKU2/IKU3/IKU4/IKU5/IKU6/IKU7/IKU8);
 - c) mengoptimalkan penggunaan e-MP (e-manajemen penyidikan) dalam mewujudkan sarana pengawasan penyidikan

penyidikan perkara dan transparansi proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan *platform* pelaporan terpadu di seluruh Polri; (*giat5085,5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU9*);

- 3) arah bijak: meningkatkan peran adaptifitas penanganan kejahatan Polri melalui pusat analisis tindak kejahatan dipusat data dan informasi kriminal nasional;

untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan transparansi dan efisiensi penanganan perkara melalui SOP dan sistem manajemen kasus yang terintegrasi; (*giat5084/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa*);

- b) melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan standardisasi data kriminal nasional (melalui *Integrated Smart Criminal Information System*);

(*giat5084/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa*);

- d. Sasaran Prioritas IV “Mewujudkan SDM Polda Kalimantan Selatan yang Profesional, Cerdas dan Berintegritas melalui Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan” terdiri dari 4 (empat) arah bijak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kualitas hasil lulusan Pendidikan dan Latihan Polri guna mewujudkan SDM Polda Kalimantan Selatan yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta siap pakai;
- 2) mewujudkan kualitas dan kapabilitas SDM Polda Kalimantan Selatan yang unggul dan humanis serta menyusun ukuran organisasi yang optimal dengan menerapkan “*Strategic Workforce Planning*”;
- 3) melaksanakan dan menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs* dan *mentorship*);
- 4) meningkatkan kesejahteraan SDM Polda Kalimantan Selatan melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah.....

- 1) arah bijak: meningkatkan kualitas hasil lulusan Pendidikan dan Latihan Polri guna mewujudkan SDM Polda Kalimantan Selatan yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta siap pakai; untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kualitas dan mutu hasil dari lulusan Diklat Polri agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan tugas Polri kedepan;
(giat5068,5069/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2);
 - b) melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi lulusan Diklat, gadik/instruktur dan pengasuh;
(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2);
 - c) meningkatkan pelaksanaan latihan dan harkatpuan fungsi “*Negosiator dan Dalmas*” yang menjunjung tinggi HAM dalam rangka penanganan konflik secara humanis, menghadapi pengamanan event daerah/nasional tahun 2026;
(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2);
 - d) meningkatkan dan melanjutkan pelatihan dalam penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang “*Menjunjung Tinggi HAM*” dalam rangka menghadapi ancaman gangguan kamtibmas dan tahapan pengamanan event daerah/nasional tahun 2026;
(giat3100,5076,3130,5087/progProfesionalismeSDMPolri, progHarkamtibmas/SP4/SS1/IKU3/SS3/IKP2);
 - e) mengikuti pelaksanaan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah bagi anggota Polri dan ASN Polri guna memaksimalkan waktu yang diperlukan dari waktu persetujuan permintaan pengadaan hingga waktu barang/jasa yang diminta diterima;
(giat3100,4341/progProfesionalismeSDM,progModernisasiAlm atsusSarprasPolri/SP4/SS3/IKP2/SS4/IKP);
- 2) arah bijak: mengoptimalkan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*SPBE*) dengan memanfaatkan teknologi informasi.....

informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Polri;

(giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKP1);

- b) mewujudkan pengembangan dan penerapan model operasional baru yang adaptif di area-area prioritas pelayanan publik Polri, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Polri yang berkualitas dan terpercaya;

(giat5053/progDukma SP4/SS5/IKP4);

- 3) arah bijak: mewujudkan kualitas dan kapabilitas SDM Polri yang unggul dan humanis serta menyusun ukuran organisasi yang optimal dengan menerapkan "*Strategic Workforce Planning*";

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 6 (enam) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) memperluas dan menyempurnakan kapabilitas Polri dengan merevitalisasi strategi rekrutmen proaktif (termasuk mengintegrasikan badan pengembangan *eksternal* dan *internal* sebagai sumber calon personel);

(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1); (G.S)

- b) melanjutkan untuk menarik minat dan mempertahankan talenta terbaik dengan mendefinisikan dan mengartikulasikan kembali "*Employee Value Proposition*" (*EVP*) Polri;

(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1); (G.S)

- c) melanjutkan dan menyempurnakan sistem pengembangan karir dengan menerapkan *personalized learning* serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personil dan organisasi dalam penyiapan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari praktik KKN;

(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1); (G.S)

- d) melaksanakan rekrutmen bagi Pegawai Negeri pada Polri

sesuai.....

sesuai kebutuhan organisasi dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta mengalokasikan rekrutmen PNS Polri yang mengakomodir kelompok berkebutuhan khusus serta berbasis teknologi informasi dengan sistem *zero growth* untuk memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas, dengan target pemenuhan personel (*rekrutmen*) tahun 2026;

(*giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*);

- e) melaksanakan kegiatan seleksi dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif ;
(*giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*);
- f) melaksanakan kegiatan pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang adaptif untuk menjadi teladan, melayani dan transformatif;
(*giat3104/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*)

- 4) arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;
untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu: melaksanakan kerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta *clear and clean* dengan menggunakan *Computer Asisted Test (CAT)* di tingkat Polda;
(*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*);
- 5) arah bijak: melaksanakan dan menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs* dan *mentorship*);
untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melanjutkan penyempurnakan standar penilaian kompetensi

serta.....

serta memberikan kredit/poin dalam sistem manajemen penilaian kinerja berdasarkan spesifikasi penugasan dan wilayah serta meningkatkan “*sistem reward and punishment*” serta sistem *reward* terhadap kualifikasi personel Polri yang mampu mengaktualisasi diri lebih baik dalam keilmuan dan kehidupan masyarakat;

(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1);

- b) memedomani sistem manajemen penilaian kompetensi Polri (kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung “program manajemen talenta”;

(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1);

- c) mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja *online* dengan SIPP guna menerapkan *Merit System* dalam manajemen pembinaan karier dalam rangka memberikan kesempatan yang sama dalam berkarya;

(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1);

- d) meningkatkan jumlah assesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus;

(giat3100,3108,5076/progProfesionalismeSDMPolri,prog Harkamtibmas/SP4/SS1/IKU2/SS3/IKP1/IKP2)

- 6) arah bijak: meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja; untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama bagi anggota Polda Kalimantan Selatan dan masyarakat;

(giat3072/progDukma,ProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1);

- b) mengoptimalkan pelayanan yang responsif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri yang gugur/tewas dalam tugas menumbuhkan budaya melayani

yang.....

yang non diskriminasi dan *user friendly*;

(*giat3072,3105/progDukma,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*);

- c) meningkatkan pelayanan administrasi pegawai yang adaptif bagi anggota Polri, menumbuhkan budaya melayani yang nondiskriminasi dan *user friendly* termasuk berkaitan dengan ASABRI;

(*giat3105/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*);

- d) melanjutkan kegiatan peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS);

(*giat3072,5062/progDukma,ModernisasiAlmatsusSarpras Polri/SP4/SS4/IKP2*)

- e. Sasaran Prioritas V “Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Terintegrasi dalam Mendukung Operasional Kepolisian” terdiri dari 2 (dua) arah bijak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI Polri (*IT Enterprise Architecture*) yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; (G.S)
- 2) mengoptimalkan dan membangun kemampuan digital dengan mengembangkan *Data, Digital Platform and Software (DDPS)* yang terintegrasi dalam Satu Data Polri. (G.S)

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI Polri (*IT Enterprise Architecture*) yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 13 (tiga belas) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melanjutkan kegiatan pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara *online*;

(giat5062,3071/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS 4/IKP2);

- b) pemenuhan almatsus Polda Kalimantan Selatan yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung kesiapan operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insujensi serta pemeliharaan keamanan;
(giat5060,3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS 4/IKP2);
- c) mengoptimalkan pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi fungsi lalu lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK *online*;
(giat5060,3084,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri, progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2);
- d) melanjutkan kegiatan pengembangan Pembangunan Indonesia *Safety Driving Center* di kewilayahan;
(giat5060,5062,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri, progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2);
- e) meningkatkan kualitas pembangunan RTMC/TMC di kewilayahan;
(giat5060,5062,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri2, progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2);
- f) mengoptimalkan pemasangan *ETLE* guna mendukung penegakan hukum secara transparan di jalan raya;
(giat5060,3084,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri, progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2);
- g) mengoptimalkan faskes dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah serta memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota Polri dan masyarakat umum;
(giat5060,5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS 4/IKP1);

h) melaksanakan

- h) melaksanakan kegiatan Litbang guna membuat *prototype* peralatan Polri yang berbasis teknologi dan inovasi teknologi kepolisian terkini;
(giat5067,5060,3084/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP3);
- i) meningkatkan dan mengembangkan pembangunan sistem komunikasi di wilayah perbatasan, pulau terluar dan wilayah rawan bencana agar terkoneksi dalam menjaga Harkamtibmas;
(giat5055,5060,3084,/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2);
- j) melanjutkan kegiatan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri terkini (*MEPE*);
(giat5060,5051/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2); (G.S)
- k) pemenuhan peralatan penanganan awal/pasca Bencana, Karhutla dan banjir sesuai dengan karakteristik wilayah dalam rangka *backup* wilayah dan pertolongan pertama;
(giat5060,3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2); (RPJMN)
- l) pemenuhan Almatsus Polri berbasis kendaraan listrik guna mendukung program pemerintah dibidang energi hijau;
(giat3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2); (RPJMN)
- m) pemenuhan almatsus/alpalkam untuk digunakan dalam pengamanan nasional/internasional 2026, perbatasan dan destinasi wisata;
(giat3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2)
- 2) arah bijak: mengoptimalkan dan membangun kemampuan digital dengan mengembangkan *Data, Digital Platform and Software (DDPS)* yang terintegrasi dalam Satu Data Polri.
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan

- a) melaksanakan pemetaan dan hasil kajian Satu Data Polri untuk pengadaan sistem informasi kepolisian secara bertahap yang terintegrasi;
(giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2);
 - b) meningkatkan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat (melalui, *hotline*, *police superapp*, *whatsapp for business*, dan lain-lain) serta penataan infrastruktur layanan darurat/*hotline* kepolisian secara bertahap dengan nomor tunggal dalam rangka merespon dengan cepat pengaduan masyarakat;
(giat5055,5062/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2);
 - c) meningkatkan kegiatan pengembangan teknologi kepolisian dan sistem informasi berdasarkan hasil penelitian/kajian yang telah dilaksanakan;
(giat3084,5067/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,progDukma/SP5/SS4/IKP2)
- f. Sasaran Prioritas VI “Meningkatkan dan Mewujudkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam rangka Memperkuat Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:
- 1) meningkatkan kegiatan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online* melalui *redesign* interaksi kepolisian dan masyarakat; (G.S)
 - 2) meningkatkan kegiatan Saber Pungli di lingkungan internal Polri guna menjaga citra Polri ditengah masyarakat;
 - 3) melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri dalam rangka *Good Government and Clean Governance*;
 - 4) meningkatkan tata kelola dari sistem manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polda Kalimantan Selatan yang transparan dan akuntabel;
 - 5) melaksanakan

- 5) melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polda Kalimantan Selatan agar lebih efektif dan efisien;
- 6) meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi Polri antara lain melalui pembangunan zona integritas, peningkatan indeks pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik ramah kelompok rentan, penciptaan inovasi, pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kegiatan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online* melalui *redesign* interaksi kepolisian dan masyarakat; untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mengoptimalkan kegiatan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu yang berbasis T.I; (*giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKP7*);
 - b) mengoptimalkan dan menyempurnakan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online*; (*giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKP7*);
 - c) meningkatkan percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas *eksternal* dengan berbasis T.I; (*giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKP7*)
- 2) arah bijak: meningkatkan kegiatan Saber Pungli di lingkungan internal Polri guna menjaga citra positif Polri ditengah masyarakat; untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 6 (enam) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kegiatan sinergitas dari Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas pungli serta pelaporan yang terintegrasi; (*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
 - b) mendorong pelayanan publik secara *online* yang bersih

transparan

transparan dan akuntabel berbasis *hotline*, *police superapp*, *Police website*, dan *social media*; (*giat3091,3149/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);

- c) melaksanakan kerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam pencegahan pungli;
(*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
 - d) melaksanakan kegiatan pengamanan (kegiatan, Personel, Baket) dalam rekrutmen pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS;
(*giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
 - e) melaksanakan pengamanan kegiatan Personel, Baket terkait Pendidikan Pengembangan: SIP, Sespima, Sespimmen/PKN Tingkat 2, Sespimti/Lemhanas dan PKN Tingkat 1;
(*giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
 - f) melaksanakan “operasi bersih” di internal dan di sentra pelayanan publik Polri baik terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik (SIM, STNK,BPKB, SKCK);
(*giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
- 3) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri dalam rangka *Good Government and Clean Governance*;
- untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan peran serta dari seluruh anggota sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait dugaan korupsi di tubuh Polri melalui Aplikasi *Whistle Blower System (WBS)*. Serta bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga pemeriksa *eksternal* serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan korupsi; (*giat3089,3090,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
 - b) meningkatkan kegiatan kepatuhan terhadap implementasi dari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; (*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);

- 4) arah bijak: meningkatkan tata kelola dari sistem manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;
- untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran satker agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program dan kegiatan; (*giat4339/progDukma/SP6/SS5/IKP6*);
 - b) meningkatkan sinergitas dalam penyusunan kebutuhan Polri di aplikasi e-Jakstra guna menyusun produk perencanaan dan penganggaran Polri (Domren Kapolri, Rancangan Renja Polri dan Renja Polri) agar selaras pembangunan di lingkungan Polri dan semakin berkualitas; (*giat5051/progDukma/SP6/SS5/IKP1*);
 - c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggungjawab tata kelola keuangan tingkat Satker; (*giat3068,3091,4339,5054/progDukma/SP6/SS5/IKP6*);
 - d) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan; (*giat3068,4339,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP6*);
 - e) melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja dan anggaran di bidang pembinaan dan operasional; (*giat3068,4339,3091,5054/progDukma/SP6/SS5/IKP6*)

5) arah

- 5) arah bijak: melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien; untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- melaksanakan *Monev* atas pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap serta *Monev* hasil efektivitas mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan);
(giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKP1)
 - penyempurnaan kaitan ABK dan DSPP serta peraturan tentang SOTK tingkat Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor serta menyusun kesiapan pembentukan Satwil baru guna mendukung IKN; *(giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKP1)*
- 6) arah bijak: meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi Polri antara lain melalui pembangunan zona integritas, peningkatan indeks pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik ramah kelompok rentan, penciptaan inovasi, pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik; untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- melaksanakan bimtek kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik melalui kegiatan Forum Konsultansi Publik (FKP), guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, humanis dan bebas dari korupsi;
(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4)
 - melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi Polri yang memenuhi syarat ke ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) serta Pemantauan dan Keberlanjutan Replikasi

Inovasi (PKRI) pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri;

(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4);

- c) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri melalui penyeragaman nomenklatur unit-unit pelayanan publik Polri; (giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4);
- d) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri melalui penyediaan unit pelayanan publik yang ramah kelompok rentan; (giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4);
- e) melanjutkan dan meningkatkan kegiatan asistensi pembangunan zona integritas kepada Satker/Satwil di lingkungan Polri guna meningkatkan jumlah capaian Satker/Satwil berpredikat WBK dan WBBM; (giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4);
- f) memberikan asistensi dan bimbingan teknis untuk mendorong capaian jumlah unit kerja berpredikat WBK dan WBBM; (giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4);
- g) sebagai *quality insurance* dengan melaksanakan *assessment* terhadap seluruh unit kerja yg sdh berpredikat baik WBK dan WBBM agar tetap mempertahankan dan meningkatkan peredikat pembangunan zona integritas baik WBK dan WBBM. (giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4).

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Hulu Sungai Utara Tahun 2026.

- a. Sasaran Prioritas I “Menjaga dan Memelihara Kamtibmas di Seluruh Wilayah Hulu Sungai Utara secara Responsif dan Prediktif” terdiri dari 9 (sembilan) arah bijak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kinerja Polres Hulu Sungai Utara sebagai bagian dari penguatan fungsi intelijen dalam melaksanakan deteksi aksi dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;

2) meningkatkan

- 2) meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan Hulu Sungai Utara melalui mengoptimalkan pengumpulan data intelijen;
- 3) mengendalikan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang responsif;
- 4) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan “Pemolisian Prediktif” dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;
- 5) mengedepankan penanganan konflik ditengah masyarakat secara humanis;
- 6) meningkatkan kegiatan Kamseltibcarlantas kepada masyarakat guna memberikan rasa aman saat berkendara, terjadi kemacetan dan saat pada jam rawan kejahatan;
- 7) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri ditengah masyarakat baik di wilayah bencana dan “*Slum Area*”;
- 8) melaksanakan tahapan pengamanan kegiatan *event* nasional/internasional serta pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun 2026;
- 9) melaksanakan “*back up*” kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan dan bencana;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kinerja Polres Hulu Sungai Utara sebagai bagian dari penguatan fungsi intelijen dalam melaksanakan deteksi aksi dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan

- a) meningkatkan kegiatan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi: deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini dari fungsi intelijen keamanan Polres Hulu Sungai Utara melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen yang mampu mendukung operasional fungsi kepolisian baik terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata serta menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial ditengah masyarakat; (*giat3112,3114,3115,3116,3117/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU7*);
 - b) penguatan program Polmas guna menumbuh kembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*); (*giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
 - c) meningkatkan kualitas hasil penelitian dan survei yang akuntabel dalam rangka mendukung pengukuran Indeks Kamtibmas Polri; (*giat5067/progDukma/SP1/SS5/IKP1*);
- 2) arah bijak: meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan Hulu Sungai Utara melalui mengoptimalkan pengumpulan data intelijen; untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mengoptimalkan pengumpulan data intelijen/informasi dengan mengembangkan repositori data terpadu yang mengintegrasikan berbagai sumber *input*; (*giat3112/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU7*);
 - b) meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui *data-sharing platform* (termasuk notifikasi potensi ancaman kepada fungsi terkait); (*giat3112/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU7*);
 - 3) arah

- 3) arah bijak: mengendalikan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang responsif;
- untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan dan mengembangkan program berorientasi masyarakat (*community-based program*) untuk menyelesaikan masalah (*problem solving*) dan mencegah kejahatan secara kolaboratif dalam pemecahan masalah yang terjadi ditengah (*giat3114,3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
 - b) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan pencegahan berupa: kontra radikal, kontra narasi dan kontra ideologi terhadap penyebaran propaganda kelompok terorisme baik pada kanal-kanal media *online* maupun komunitas masyarakat yang rentan terpapar oleh paham radikalisme dan terorisme; (*progLidiksidik/giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU9*);
 - c) meningkatkan dan menciptakan pendekatan adaptif kepada masyarakat dengan melibatkan peran *civil society* dan tokoh agama yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme; (*progLidikSidik/giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU9*);
 - d) meningkatkan kegiatan menetralisir informasi negatif ditengah masyarakat yang dapat mengganggu Kamtibmas dengan mengelola opini publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri; (*giat3070/progDukma/SP1/SS5/IKP7*);
 - e) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan “*edukasi*” dan himbauan kepada masyarakat berupa pesan Kamtibmas untuk pencegahan kejahatan melalui produksi *konten kreatif*, melaksanakan *press release* tentang Kamtibmas dengan tujuan meningkatkan citra positif terhadap Polri; (*giat3070/progDukma/SP1/SS5/IKP7*);
 - f) meningkatkan kegiatan patroli yang adaptif di wilayah rawan kejahatan

kejahatan dan kriminalitas serta melaksanakan pelacakan dan penangkalan di tempat Obvit/Obvitnas dan destinasi pariwisata;

(giat3130,3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5);

- 4) arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan kegiatan "*Pemolisian Prediktif*" dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya guna menumbuh kembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*); (giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);
 - b) peningkatan kegiatan pemberdayaan pengembangan kewenangan fungsi kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus; (giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);
 - c) meningkatkan pelaksanaan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas kepada masyarakat pengguna jalan; (giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- 5) arah bijak: mengedepankan penanganan konflik ditengah masyarakat secara humanis; untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan peran dari para Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis; (giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);
 - b) meningkatkan kegiatan mengorganisasikan masyarakat untuk mengalihkan potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang bersifat positif; (giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);

6) arah

- 6) arah bijak: meningkatkan kegiatan Kamseltibcarlantas kepada masyarakat guna memberikan rasa aman saat berkendara, terjadi kemacetan dan saat pada jam rawan kejahatan; untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- meningkatkan pelaksanaan kegiatan kepolisian yang adaptif dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli ditengah masyarakat; (*giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);
 - meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan yang adaptif di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan kejahatan serta berperan aktif mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas; (*giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);
 - meningkatkan kegiatan patroli dan penjagaan yang adaptif di Obvit/Obvitnas dan tempat destinasi pariwisata saat jam-jam rawan dalam rangka mendukung “Akselerasi Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” serta berperan aktif ditengah masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas; (*giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5*);
- 7) arah bijak: meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri ditengah masyarakat baik di wilayah bencana dan “*Slum Area*”, untuk mewujudkan arah bijak 7, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- meningkatkan kesiapsiagaan personel Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi “ketanggapsegeraan” dalam penanggulangan bencana, keselamatan dan reintegrasi serta di wilayah rawan kriminalitas yang berintensitas tinggi, bencana serta wabah; (*progHarkamtibmas/SP1/ SS1/IKU6*);
 - meningkatkan dukungan penyelenggaraan dan pelayanan

bantuan penanganan SAR terbatas dalam penanggulangan bencana dan keselamatan yang dilaksanakan oleh personel Sabhara; (*giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);

- c) meningkatkan akurasi dalam memetakan desa/wilayah rawan gempa, bencana dan Banjir oleh “*Bhabinkamtibmas*” yang wilayah didiami oleh masyarakat guna memudahkan identifikasi masyarakat yang menjadi korban saat dan pasca bencana; (*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
- 8) arah bijak: melaksanakan tahapan pengamanan kegiatan *event* nasional/internasional serta pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun 2026;
untuk mewujudkan arah bijak 8, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan respon yang cepat dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan intensitas tinggi serta mengoptimalkan penggunaan kekuatan Polres Hulu Sungai Utara yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; (*giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6*);
 - b) melaksanakan perencanaan operasi kepolisian dalam rangka pengamanan *event* nasional/internasional dan regional tahun 2026; (*giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);
 - c) melaksanakan kegiatan pengamanan nasional tahun 2026 meliputi: Pengaturan, Patroli, Penjagaan, Pengawalan; (*giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);
 - d) menyelenggarakan pengamanan objek vital di lokasi *event*; (*giat3130,3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5*);
- 9) arah bijak: melaksanakan “*back up*” kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan dan bencana;

untuk

untuk mewujudkan arah bijak 9, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan koordinasi kesiapan dari personel Polres Hulu Sungai Utara agar mampu digerakkan secara cepat dalam rangka “back up” wilayah rawan konflik; (*giat3130,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);
 - b) meningkatkan sinergitas dalam membangun kerja sama dengan satuan kewilayahan serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban Hulu Sungai Utara yang kondusif; (*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);
 - c) meningkatkan pelaksanaan “back up” pengamanan kegiatan ditengah masyarakat yang sedang beraktivitas; (*giat3130,3131,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);
 - d) meningkatkan pelaksanaan “back up” kegiatan pengamanan di kawasan obvitnas dan objek tertentu; (*giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5*);
- b. Sasaran Prioritas II “Mewujudkan Pelayanan Publik Polres Hulu Sungai Utara yang Berkualitas dan Terintegrasi”, terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:
- 1) meningkatkan dan menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat secara multimoda;
 - 2) meningkatkan dan melanjutkan pelayanan yang adaptif dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri;
 - 3) meningkatkan “*ketanggapsegeraan*” dalam melayani masyarakat baik dalam pelayanan publik Polres Hulu Sungai Utara, harkamtibmas dan penegakan hukum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- a. arah bijak: meningkatkan dan menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat secara multimoda;

untuk

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan layanan pengaduan berbasis *website* atau *media sosial* guna meningkatkan citra Polri yang responsif dan tidak *berbelit-belit*; (*giat3070/progDukma/SP2/SS5/IKU7*);
 - b) meningkatkan kolaborasi dalam penanganan pelayanan pengaduan guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat saat menyampaikan keluhannya; (*giat3089,3091/progLidikSidik,Dukma/SP2/SS2/IKU9/SS5/IKP7*);
- b. arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan pelayanan yang adaptif dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri;
- untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan pelayanan *Online* yang terintegrasi serta adaptif dalam pelayanan di kantor pelayanan/keliling di bidang lalu lintas yang lebih menjangkau masyarakat serta pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian; (*giat3133/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1*);
 - b) meningkatkan kegiatan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor; (*giat3133/progHarkamtibmas/giat3071,5055/progDukma/SP2/SS1/IKU1*);
 - c) meningkatkan inovasi layanan yang adaptif bagi masyarakat serta efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal di lokasi *afirmatif* (menguatkan) di kawasan perbatasan; (*giat3133/progHarkamtibmas,progDukma/SP2/SS1/IKP4b*);
 - d) meningkatkan *update* informasi dan dokumentasi pada layanan/laman *website humaspolreshsu.go.id* secara berkala guna meningkatkan citra positif Polri dimata masyarakat; (*giat3070/progDukma/SP2/SS5/IKP7*);
 - e) meningkatkan

- e) meningkatkan inovasi dan perbaikan yang adaptif dalam memberikan pelayanan intelkam dan optimalisasi sistem pelayanan SKCK *online*; (*giat3112/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU11*);
- c. arah bijak: meningkatkan “*ketanggap segeraan*” dalam melayani masyarakat baik dalam pelayanan publik Polri, harkamtibmas dan penegakkan hukum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP); untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melanjutkan, melaksanakan Monev dan terus mengkaji guna merespon aturan/SOP dipelayanan publik yang berbelit-belit; (*giat5053/progDukma/SP2/SS5/IKP4*);
 - b) meningkatkan dan merespon pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu yang lebih adaptif melalui pembinaan teknis dan audit; (*giat3130,3131/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU5*);
- c. Sasaran Prioritas III “Menegakkan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan” terdiri dari 2 (dua) arah bijak sebagai berikut:
 - 1) mengedepankan kolaborasi dan Kerjasama antar penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
 - 2) meningkatkan dan mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) Arah bijak: mengedepankan kolaborasi dan Kerjasama antar penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 9 (sembilan) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kegiatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dengan serta tindak pidana siber, judi *online*,

penyelundupan barang, korupsi (pencegahan dan *asset recovery*), Narkoba, terorisme, Karhutla/LH serta siber termasuk kejahatan TPPO dan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (*giat3140,3142,3144,3146,5083, progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/IKU3/IKU4*);

- b) meningkatkan kegiatan penegakan hukum terhadap kejahatan perekonomian dibidang pangan, pertanahan, energi, investasi/perbankan (sektor keuangan); (*giat3142,5083/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU4*);
- c) melaksanakan kegiatan penindakan tindak pidana di perairan dalam mendukung kegiatan keamanan perairan; (*giat4342/progSidikLidik/SP3/SS2/IKU7*);
- d) melaksanakan kegiatan penanganan/ penindakan tindak pidana dan pelanggaran Lalu Lintas dalam rangka mewujudkan “*Road Safety*” serta penegakkan hukum melalui “*ETLE*” dan tilang manual;
(*giat3133/progHarkamtibmas, 4343/progSidikLidik/SP3/SS1/ IKU1/SS2/IKU6*);
- e) melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara melalui “*Restorative Justice*” yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan; (*giat3142/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);
- f) meningkatkan penanganan kejahatan di ruang siber (*cyber crime*) yang mengedepankan kualitas serta mengedukasi masyarakat; (*progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2*);
- g) melaksanakan penindakan hukum terbatas/tipiring dalam menjaga Harkamtibmas; (*giat3130/progHarkamtibmas/ SP3/SS2/IKUb*);
- h) meningkatkan dan mempercepat penyelesaian perkara-perkara secara responsif guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat; (*giat3142,3144,3146,/progLidikSidik/ SP3/ SS2/IKU9*);

i) meningkatkan

- i) meningkatkan pemberian bantuan teknis penyidikan dalam rangka pengolahan TKP dan pemeriksaan Barang Bukti; (*giat3140/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);
- 2) arah bijak: meningkatkan dan mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat; untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mengoptimalkan pelaksanaan pemberian *SP2HP2* kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir *komplain* dari masyarakat kepada Polri dibidang penegakan hukum dan menjunjung tinggi HAM sebagai bentuk pelayanan kepada pelapor/korban dan tersangka; (*giat3137,5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU9*);
 - b) mengoptimalkan peran “*Waskat*” dari atasan penyidik dan peran dari wassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (*giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU1/IKU2/IKU3/IKU4/IKU5/IKU6/IKU7/IKU8*);
 - c) mengoptimalkan penggunaan *e-MP* (e-manajemen penyidikan) dalam mewujudkan sarana pengawasan penyidikan perkara dan transparansi proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan *platform* pelaporan terpadu di seluruh Polri; (*giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU9*);
- d. Sasaran Prioritas IV “Mewujudkan SDM Polres Hulu Sungai Utara yang Profesional, Cerdas dan Berintegritas melalui Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan” terdiri dari 4 (empat) arah bijak sebagai berikut:
 - 1) meningkatkan kualitas hasil lulusan Pendidikan dan Latihan Polri guna mewujudkan SDM Polres Hulu Sungai Utara yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta siap pakai;
 - 2) mengoptimalkan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*SPBE*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna *SPBE*;
 - 3) mewujudkan

- 3) mewujudkan kualitas dan kapabilitas SDM Polres Hulu Sungai Utara yang unggul dan humanis serta menyusun ukuran organisasi yang optimal dengan menerapkan "Strategic Workforce Planning";
- 4) meningkatkan kesejahteraan SDM Polres Hulu Sungai Utara melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kualitas hasil lulusan Pendidikan dan Latihan Polri guna mewujudkan SDM Polres Hulu Sungai Utara yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta siap pakai; untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mendukung pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi bagi lulusan Diklat, gadik/instruktur dan pengasuh; (*SP4/SS3/IKP2*);
 - b) mendukung peningkatkan pelaksanaan latihan dan harkatpuan fungsi "*Negosiator dan Dalmas*" yang menjunjung tinggi HAM dalam rangka penanganan konflik secara humanis, menghadapi pengamanan *event* daerah/nasional tahun 2026; (*SP4/SS3/IKP2*);
 - c) mengikuti pelaksanaan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah bagi anggota Polri dan ASN Polri guna memaksimalkan waktu yang diperlukan dari waktu persetujuan permintaan pengadaan hingga waktu barang/jasa yang diminta diterima; (*progModernisasiAlmatsus SarprasPolri/SP4/SS3/IKP2/SS4/IKP*);
- 2) arah bijak: mengoptimalkan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*SPBE*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE; untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Polri; (*progDukma/SP4/SS5/IKP1*);

- b) mewujudkan pengembangan dan penerapan model operasional baru yang adaptif di area-area prioritas pelayanan publik Polri, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Polri yang berkualitas dan terpercaya; (*giat5053/progDukma SP4/SS5/IKP4*);
- 3) arah bijak: mewujudkan kualitas dan kapabilitas SDM Polri yang unggul dan humanis serta menyusun ukuran organisasi yang optimal dengan menerapkan “*Strategic Workforce Planning*”; untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mendukung dalam melanjutkan menarik minat dan mempertahankan talenta terbaik dengan mendefinisikan dan mengartikulasikan kembali “*Employee Value Proposition*” (*EVP*) Polri; (*SP4/SS3/IKP1*); (G.S)
 - b) mendukung dalam melanjutkan dan menyempurnakan sistem pengembangan karir dengan menerapkan *personalized learning* serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personil dan organisasi dalam penyiapan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari praktik KKN; (*SP4/SS3/IKP1*); (G.S)
 - c) melaksanakan rekrutmen bagi Pegawai Negeri pada Polri sesuai kebutuhan organisasi dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta mengalokasikan rekrutmen PNS Polri yang mengakomodir kelompok berkebutuhan khusus serta berbasis teknologi informasi dengan sistem *zero growth* untuk memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas, dengan target pemenuhan personel (*rekrutmen*) tahun 2026; (*SP4/SS3/IKP1*);
 - d) melaksanakan kegiatan seleksi dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif ; (*SP4/SS3/IKP1*);
 - e) mendukung

- e) mendukung pelaksanakan kegiatan pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang adaptif untuk menjadi teladan, melayani dan transformatif; (*SP4/SS3/IKP1*);
- 4) arah bijak: meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama bagi anggota Polres Hulu Sungai Utara dan masyarakat; (*progDukma/SP4/SS3/ IKP1*);
 - b) mengoptimalkan pelayanan yang responsif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri yang gugur/tewas dalam tugas menumbuhkan budaya melayani yang non diskriminasi dan *user friendly*; (*progDukma/SP4/SS3/IKP1*);
 - c) meningkatkan pelayanan administrasi pegawai yang adaptif bagi anggota Polri, menumbuhkan budaya melayani yang nondiskriminasi dan *user friendly* termasuk berkaitan dengan ASABRI; (*SP4/SS3/IKP1*);
 - d) melanjutkan kegiatan peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS); (*giat3072,5062/progDukma, ModernisasiAlmatsusSarpras Polri/SP4/SS4/IKP2*);
- e. Sasaran Prioritas V “Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Terintegrasi dalam Mendukung Operasional Kepolisian” terdiri dari 2 (dua) arah bijak sebagai berikut:
 - 1) meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI Polri (*IT Enterprise Architecture*) yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; (G.S)
 - 2) mengoptimalkan dan membangun kemampuan digital dengan

mengembangkan

mengembangkan *Data, Digital Platform and Software (DDPS)* yang terintegrasi dalam Satu Data Polri. (G.S)

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI Polri (*IT Enterprise Architecture*) yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mendukung pemenuhan almatsus Polres Hulu Sungai Utara yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung kesiapan operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insujensi serta pemeliharaan keamanan; (*progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/ SP5/SS4/IKP2*);
 - b) mengoptimalkan pemasangan *ETLE* guna mendukung penegakan hukum secara transparan di jalan raya; (*giat5060,3084,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2*);
 - c) mengoptimalkan faskes dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah serta memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota Polri dan masyarakat umum; (*progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP1*);
 - d) melanjutkan kegiatan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri terkini (*MEPE*); (*progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2*); (G.S)
 - e) mendukung pemenuhan peralatan penanganan awal/pasca Bencana, Karhutla dan banjir sesuai dengan karakteristik wilayah dalam rangka *backup* wilayah dan pertolongan pertama;
(*giat5060,3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2*); (RPJMN)

2) arah

2) arah bijak: mengoptimalkan dan membangun kemampuan digital dengan mengembangkan *Data, Digital Platform and Software (DDPS)* yang terintegrasi dalam Satu Data Polri.

untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melaksanakan pemetaan dan hasil kajian Satu Data Polri untuk pengadaan sistem informasi kepolisian secara bertahap yang terintegrasi; (*giat3084/progModernisasiAlmatsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKP2*);

b) meningkatkan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat (melalui, *hotline, police superapp, whatsapp for business*, dan lain-lain) serta penataan infrastruktur layanan darurat/*hotline* kepolisian secara bertahap dengan nomor tunggal dalam rangka merespon dengan cepat pengaduan masyarakat; (*giat5055,5062/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2*);

c) meningkatkan kegiatan pengembangan teknologi kepolisian dan sistem informasi berdasarkan hasil penelitian/kajian yang telah dilaksanakan; (*giat3084,5067/progModernisasiAlmatsus SarprasPolri,progDukma/SP5/SS4/IKP2*);

f. Sasaran Prioritas VI “Meningkatkan dan Mewujudkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam rangka Memperkuat Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:

1) meningkatkan kegiatan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online* melalui *redesign* interaksi kepolisian dan masyarakat; (G.S)

2) meningkatkan kegiatan Saber Pungli di lingkungan internal Polri guna menjaga citra Polri ditengah masyarakat;

3) melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri dalam rangka *Good Government and Clean Governance*;

4) meningkatkan

- 4) meningkatkan tata kelola dari sistem manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polres Hulu Sungai Utara yang transparan dan akuntabel;
- 5) melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polres Hulu Sungai Utara agar lebih efektif dan efisien;
- 6) meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi Polri antara lain melalui pembangunan zona integritas, peningkatan indeks pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik ramah kelompok rentan, penciptaan inovasi, pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kegiatan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online* melalui *redesign* interaksi kepolisian dan masyarakat; untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mengoptimalkan kegiatan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu yang berbasis T.I;
(giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKP7);
 - b) mengoptimalkan dan menyempurnakan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online*;
(giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKP7);
 - c) meningkatkan percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas *eksternal* dengan berbasis T.I;
(giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKP7);
- 2) arah bijak: meningkatkan kegiatan Saber Pungli di lingkungan internal Polri guna menjaga citra positif Polri ditengah masyarakat; untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kegiatan sinergitas dari Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas

- memberantas pungli serta pelaporan yang terintegrasi;
(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5);
- b) mendorong pelayanan publik secara *online* yang bersih transparan dan akuntabel berbasis *hotline*, *police superapp*, *Police website*, dan *social media*;
(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5);
- c) melaksanakan kerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam pencegahan pungli;
(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5);
- d) melaksanakan kegiatan pengamanan (kegiatan, Personel, Baket) dalam rekrutmen pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS;
(giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5);
- e) melaksanakan “operasi bersih” di internal dan di sentra pelayanan publik Polri baik terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik (SIM, STNK,BPKB, SKCK);
(giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5);
- 3) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri dalam rangka *Good Government and Clean Governance*;
- untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan peran serta dari seluruh anggota sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait dugaan korupsi di tubuh Polri melalui Aplikasi *Whistle Blower System (WBS)*. Serta bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga pemeriksa *eksternal* serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan korupsi;
(giat3089,3090,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5);
- b) meningkatkan kegiatan kepatuhan terhadap implementasi dari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Lingkungan

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5);

- 4) arah bijak: meningkatkan tata kelola dari sistem manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran satker agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program dan kegiatan;
(progDukma/SP6/SS5/IKP6);
 - b) meningkatkan sinergitas dalam penyusunan kebutuhan Polri di aplikasi e-Jakstra guna menyusun produk perencanaan dan penganggaran Polri (Domren Kapolri, Rancangan Renja Polri dan Renja Polri) agar selaras pembangunan di lingkungan Polri dan semakin berkualitas;
(giat5051/progDukma/SP6/SS5/IKP1);
 - c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggungjawab tata kelola keuangan tingkat Satker;
(giat3091,5054/progDukma/SP6/SS5/IKP6);
 - d) mendukung pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan;
(progDukma/SP6/SS5/IKP6);
 - e) melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja dan anggaran di bidang pembinaan dan operasional;
(giat3091,5054/progDukma/SP6/SS5/IKP6);
- 5) arah bijak: melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien;

untuk

untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) mendukung pelaksanaan *Monev* atas pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap serta *Monev* hasil efektivitas mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan);
(progDukma/SP6/SS5/IKP1);
 - b) penyempurnaan kaitan ABK dan DSPP serta peraturan tentang SOTK tingkat Polres, Polsek dan Polsubsektor serta menyusun kesiapan pembentukan Satwil baru guna mendukung IKN;
(progDukma/SP6/SS5/IKP1);
- 6) arah bijak: meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi Polri antara lain melalui pembangunan zona integritas, peningkatan indeks pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik ramah kelompok rentan, penciptaan inovasi, pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik; untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 6 (enam) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan bimtek kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik melalui kegiatan Forum Konsultansi Publik (FKP), guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, humanis dan bebas dari korupsi;
(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4);
 - b) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi Polri yang memenuhi syarat ke ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) serta Pemantauan dan Keberlanjutan Replikasi Inovasi (PKRI) pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri;
(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4);
 - c) peningkatan

- c) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri melalui penyeragaman nomenklatur unit-unit pelayanan publik Polri;
(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4);
- d) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri melalui penyediaan unit pelayanan publik yang ramah kelompok rentan;
(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4);
- e) melanjutkan dan meningkatkan kegiatan asistensi pembangunan zona integritas kepada Satker/Satwil di lingkungan Polri guna meningkatkan jumlah capaian Satker/Satwil berpredikat WBK dan WBBM;
(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4);
- f) mendukung asistensi dan bimbingan teknis untuk mendorong capaian jumlah unit kerja berpredikat WBK dan WBBM;
(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4);

IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif

1. Program dan Kegiatan Polres Hulu Sungai Utara T.A. 2026.

a. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

1) Tujuan :

Terwujudnya stabilitas politik dan keamanan melalui penegakkan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2) Kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (3140);
- b) Penindakan Tindak Pidana Umum (3142);
- c) Penindakan Tindak Pidana Narkoba (3144);
- d) Penindakan Tindak Pidana Korupsi (3146);
- e) Penindakan Tindak Pidana Perairan (4342);
- f) Penindakan Tindak Pidana Laka Lantas (4343);
- g) Penindakan Tindak Pidana Tertentu (5083);
- h) Koordinasi

- h) Koordinasi dan pengawasan PPNS (5085);
i) Pengawasan Penyidikan (5086).
- b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri.
- 1) Tujuan :
Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi sarana dan prasarana aparatur Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pembinaan dan operasional.
- 2) Kegiatan :
a) Dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras (5059);
b) Pengembangan Perbekalan Umum (5061).
- c. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- 1) Tujuan :
Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemptif dan preventif.
- 2) Kegiatan :
a) Analisis Keamanan (3112);
b) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik (3114);
c) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi (3115);
d) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya (3116);
e) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara (3117);
f) Dukungan Manajemen Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (3128);
g) Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara (3130);
h) Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital (3131);
i) Peningkatan

i) Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas (3133);

j) Pembinaan Potensi Keamanan (5076);

k) Pembinaan Operasi Kepolisian (5079).

d. Program Dukungan Manajemen.

1) Tujuan :

Terwujudnya good governance dan clean government melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, kebijakan program anggaran yang tepat waktu dan integrasi.

2) Kegiatan :

- a) Penerangan Masyarakat (3070);
- b) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri (3073);
- c) Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri (3089);
- d) Penegakan Tata Tertib dan Disiplin Polri (3090);
- e) Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan (3091);
- f) Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (3155);
- g) Penyusunan Kebijakan Polri (5051);
- h) Manajemen Anggaran (5054).

2. Pagu Indikatif Polres Hulu Sungai Utara T.A. 2026.

a. usulan Pagu Indikatif Polres Hulu Sungai Utara T.A. 2026 adalah sebesar Rp. 41.419.269.000,- (Empat puluh satu miliar empat ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1) rincian Pagu Indikatif T.A. 2026 per Jenis Belanja sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai : Rp. 28.774.235.000,-

b) Belanja Barang : Rp. 12.645.034.000,-

2) rincian Pagu Indikatif T.A. 2026 per Sumber Anggaran sebagai berikut:

a) Rupiah Murni : Rp. 40.028.081.000,-

b) PNBP : Rp. 1.391.188.000,-

c. rincian

- 3) rincian Pagu Anggaran T.A. 2026 per Progam sebagai berikut:
- a) BI - Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp. 2.619.819.000,-
 - b) BP- Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri Rp. 605.641.000,-
 - c) BQ- Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp. 5.976.832.000,-
 - d) WA- Program Dukungan Manajemen Rp. 32.216.977.000,-
- b. kegiatan yang berdasarkan usulan Pagu Indikatif Polri T.A. 2026
- 1) mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja, termasuk dari pemenuhan *Intake* Polri tahun 2026, dan usulan kenaikan ini termasuk rencana untuk penambahan tunjangan kinerja sampai dengan 80%;
 - 2) kegiatan belanja barang operasional anggaran perkantoran (antara lain: Internet, Listrik, Air, biaya pemeliharaan peralatan fungsional, BMP (kendaraan bermotor), dukungan kesehatan, Kapor, harwat dan makan tahanan);
 - 3) kegiatan belanja barang non operasional fungsi teknis kepolisian, berupa: deteksi aksi dan deteksi dini dari potensi gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan masyarakat, penegakkan hukum, pengamanan kegiatan masyarakat;
 - 4) pemenuhan penguatan sarana prasarana dalam rangka peningkatan profesionalisme SDM Polri, meningkatkan pelayanan publik Polri (SPKT/RPK/Satpas), penanganan gejolak/ konflik sosial, penanganan “*flash point*”, terorisme, penyebaran berita hoax dan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, siber dan penanganan peristiwa yang berimplikasi kontingensi, Almatsus Polres Hulu Sungai Utara serta peralatan dalam mendukung *event* daerah/nasional tahun 2026;
 - 5) meningkatkan

- 5) meningkatkan kegiatan *preemptif* dan *preventif* secara maksimal dengan mengoptimalkan petugas Bhabinkamtibmas melalui “strategi Polmas” guna mewujudkan Polisi modern di era *police 5.0* dengan penerapan “*personal smart tools*” dalam menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas;
- 6) meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan gangguan Kamtibmas dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional;
- 7) mendukung meningkatkan pelaksanaan sosialisasi, penyusunan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Polri kepada masyarakat serta pemberian advokasi terhadap institusi Polri, anggota Polri maupun keluarga Polri dan masyarakat;
- 8) 4 (empat) arah kebijakan utama “*Presisi*” mengakomodir kegiatan Program Prioritas Kapolri (*Quick Wins Presisi*) yang terdiri dari:
 - a) Transformasi Organisasi;
 - b) Transformasi Operasional;
 - c) Transformasi Pelayanan Publik;
 - d) Transformasi Pengawasan.
- 9) 8 Program “*Quick Wins Presisi*” meliputi :
 - a) Membangun Budaya Integritas Organisasi;
 - b) Menerapkan Sistem Pemolisian Berbasis Digital;
 - c) Mengembangkan Sumber Daya Manusia Unggul;
 - d) Menciptakan Suasana Kondusif diMasyarakat (*Cooling System*);
 - e) Memantapkan Pemeliharaan Kamtibmas;
 - f) Mengoptimalkan Penegakkan Hukum;
 - g) Meningkatkan Pelayanan Publik;
 - h) Mengoptimalkan Pengawasan.

V. Penutup.

Demikian Rencana Kerja Polres Hulu Sungai Utara T.A. 2026 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Polres Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 30 Juli 2025



LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR HULUSUNGAI UTARA



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH KALIMANTAN SELATAN
 RESOR HULUSUNGAI UTARA



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
POLRES HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2026	KET
1	2	3	4	5
SI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Hulu Sungai Utara yang Terkendali, melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern dan Akuntabel;	Indeks Keamanan dan Ketertiban Hulu Sungai Utara	3,6	
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;	Indeks Harkamtibmas	3,6	
SS2	Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan;	Indeks Gakkum	4,0	
SS3	Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polres Hulu Sungai Utara yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh;	a. Indeks Profesionalitas SDM	74,1	
		b. Indeks Pembangunan dan Pengembangan kapasitas SDM Polres Hulu Sungai Utara	83	
SS4	Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern;	a. Persentase Pemenuhan Harwat Sarpras Polres Hulu Sungai Utara	95	
		b. Tingkat Pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE)	80%	

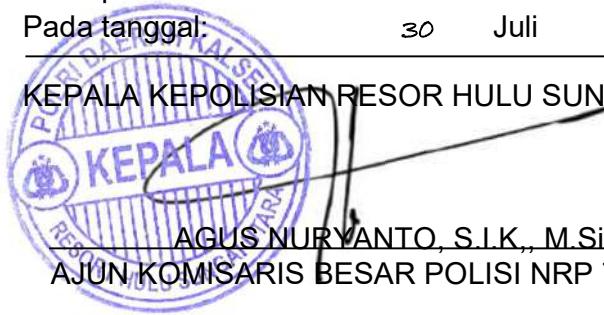
SS5

1	2	3	4	5
SS5	Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel.	a. Nilai AKIP Polres Hulu Sungai Utara	74,06	
		b. Indeks Reformasi Birokrasi	72,42	
		c. Nilai Kinerja Anggaran	97.05	
		d. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK)	80	
		e. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	94,34%	
		f. Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polri	80%	

Ditetapkan di: Amuntai

Pada tanggal: 30 Juli 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA



AGUS NURYANTO, S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77081244



**LAMPIRAN RENJA (K/L)
KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

REKAP 1 : K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/ LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. VISI: : Terwujudnya Hulu Sungai Utara yang Maju, Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat
3. MISI: : Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat di Daerah Hukum Polres Hulu Sungai Utara
4. PRIORITAS POLRI

KODE	PRIORITAS POLRI	ALOKASI 2026
05	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	
	Total	-

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2026	ALOKASI 2026
	Keamanan dan Ketertiban Hulu Sungai Utara		
	Indeks Keamanan dan Ketertiban Hulu Sungai Utara	3,6	
01	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif		5.976.832.000
01.01	Indeks Harkamtibmas	3,6	
02	Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan berkeadilan		2.619.819.000
02.01	Indeks Gakkum	4%	
03	Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polres Hulu Sungai Utara yang Berintegritas dan Adaktif secara Terpadu dan Menyeluruh		
03.01	Indeks Profesionalitas SDM	74,1	
03.02	Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polres Hulu Sungai Utara	83	
04	Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Bedaya Guna dan Modern		605.641.000
04.01	Persentase Pemenuhan Harwat sarpras Polres Hulu Sungai Utara	95	
04.02	Tingkat Pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE)	80%	
05	Tata Kelola yang bersih, Transparan, dan Akuntabel		32.216.977.000
05.01	Nilai AKIP Polres Hulu Sungai Utara	74,06	
05.02	Indeks Reformasi Birokrasi	72,42	
05.03	Nilai Kinerja Anggaran	97,05	
05.04	Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK)	80%	
05.05	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	94%	
05.06	Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri	80%	
	Total		41.419.269.000

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
060.01.BI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	2.587.398.000	0	0	0	0	0	32.421.000	0	0	-	2.619.819.000
060.01.BP	Program Modernisasi Almatsus Sarana dan Prasarana Polri	-	0	0	0	0	0	605.641.000	0	0	-	605.641.000
060.01.BQ	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	5.223.706.000	0	0	0	0	0	753.126.000	0	0	-	5.976.832.000
060.01.WA	Program Dukungan Manajemen	32.216.977.000	0	0	0	0	0	-	0	0	-	32.216.977.000
Total		40.028.081.000	0	0	0	0	0	1.391.188.000	0	0	-	41.419.269.000

Amuntai, 30 Juli 2025



REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN 2026

1 KEMENTERIAN/ LEMBAGA

: KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDOENSIA

2 SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG

: 02 - Penegakkan hukum secara berkeadilan

3 PROGRAM

: Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

4 UNIT ORGANISASI (ESELON II)

: Polri Resor Hulu Sungai Utara

5 PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2026
-		2.619.819.000
Total		

6 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2026	ALOKASI 2026
01	Terciptanya rasa aman terhadap Kejahatan Konvensional, Kejahatan Transnasional, Kejahatan terhadap kekayaan negara dan Kejahatan Berimplikasi Kontijensi		2.619.819.000
01.01	Prosentase pengungkapan tindak pidana konvensional		
01.02	Prosentase pengungkapan tindak pidana transnasional		
01.03	Prosentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan negara		
01.04	Prosentase pengungkapan tindak pidana yang berimplikasi kontijensi		
Total			2.619.819.000

7 OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2026
01	Layanan Umum Dukungan Manajemen Lidik Sidik	397.850.000
01.01	Jumlah layanan Perkantoran Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	
02	Hasil Pemeriksaan Identifikasi	81.000.000
02.01	Jumlah hasil pemeriksaan identifikasi	
03	Penanganan Tindak Pidana Umum	1.103.844.000
03.01	Jumlah Penanganan Tindak Pidana Umum	
04	Penanganan Tindak Pidana Narkoba	670.691.000
04.01	Jumlah Penanganan Tindak Pidana Narkoba	
06	Penanganan Tindak Pidana Korupsi	180.430.000
06.01	Jumlah Penanganan Tindak Pidana Korupsi	
07	Penanganan Tindak Pidana Perairan	18.000.000
07.01	Jumlah Penanganan Tindak Pidana Perairan	
08	Penanganan Tindak Pidana Laka Lantas	32.421.000
08.01	Jumlah Penanganan Tindak Pidana Laka Lantas	
09	Penanganan Tindak Pidana Tertentu	111.913.000
09.01	Jumlah Penanganan Tindak Pidana Tertentu	
10	Bantuan Koordinasi dan Pengawasan PPNS	14.000.000
10.01	Jumlah Bantuan Koordinasi dan Pengawasan PPNS	
11	Pengawasan Penyidikan	9.670.000
11.01	Jumlah Pengawasan Penyidikan	
Total		2.619.819.000

8 KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
3137	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	397.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397.850.000
3140	Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	81.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.000.000
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	1.103.844.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.103.844.000
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	670.691.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670.691.000
3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	180.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.430.000
4342	Penindakan Tindak Pidana Perairan	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000
4343	Penindakan Tindak Pidana Laka Lantas	0	0	0	0	0	0	32.421.000	0	0	0	32.421.000
5083	Penindakan Tindak Pidana Tertentu	111.913.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.913.000
5085	Koordinasi dan Pengawasan PPNS	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000
5086	Pengawasan Penyidikan	9.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.670.000
Total		2.587.398.000	0	0	0	0	0	32.421.000	0	0	0	2.619.819.000

Amuntai, 30 Juli 2025



**REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN 2026**

1 KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2 SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 04 - Pemenuhan Sarana Prasarana

3 PROGRAM : Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri

4 UNIT ORGANISASI (ESELON II) : Polri Resor Hulu Sungai Utara

5 PRIORITY NASIONAL

KODE	PRIORITY NASIONAL/ PROGRAM PRIORITY	ALOKASI 2026
-		605.641.000
Total		

6 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2026	ALOKASI 2026
01	Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas		605.641.000
01.01	Prosentase/jml kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas guna memenuhi Standar Pelayanan Kamtibmas Prima		
Total			605.641.000

7 OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2025
01	Layanan Dukungan manajemen Program Sarpras	605.641.000
01.01	Jumlah Layanan	
Total		605.641.000

8 KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	RUPIAH	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026									
			PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	0	0	0	0	0	0	96.541.000	0	0	0	96.541.000
5061	Pengembangan Perbekalan Umum	0	0	0	0	0	0	509.100.000	0	0	0	509.100.000
Total		0	0	0	0	0	0	605.641.000	0	0	0	605.641.000

Amuntai, 30 Juli 2025

KEPALA KEPOLISIAN PESOR HULU SUNGAI UTARA



AGUS MURYANTO, S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79081244

**REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN 2026**

- 1 KEMENTERIAN/ LEMBAGA** : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDOENSIA
- 2 SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG** : 01 - Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
- 3 PROGRAM** : Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- 4 UNIT ORGANISASI (ESELON II)** : Polri Resor Hulu Sungai Utara
- 5 PRIORITAS NASIONAL**

KODE	PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2026
-		1.104.262.000

6 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2026	ALOKASI 2026
01	Mengembangkan langkah-langkah strategi, dan mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber		1.104.262.000
01.01	Jumlah Kegiatan Intelijen yang dapat menurunkan potensi gangguan keamanan dalam negeri		
01.02	Jumlah jaringan di bidang Ipoleksosbudhankam		
01.03	Jumlah produk intelijen yang dihasilkan		
02	Mendekatkan Polri dengan berbagai komunitas masyarakat agar terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk membantu tugas Kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (Community Policing)		917.674.000
02.01	Jumlah Kasat/ Kanit Binmas yang telah mendapatkan pelatihan Polmas		
02.02	Jumlah jaringan di bidang Ipoleksosbudhankam		
04	Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dsn ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera		3.954.896.000
04.01	Jumlah kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi Baharkam Polri		
04.02	Jumlah kegiatan pengaturan penjagaan patroli dan pengawalan di jalan raya		
04.03	Jumlah Patroli perairan dan udara di seluruh wilayah hukum RI		
04.04	Jumlah pengamanan objek vital/ objek vital nasional dan VVIP		
04.05	Jumlah Patroli di tempat-tempat wisata yang melibatkan satwa anjing dan kuda		
Total			5.976.832.000

7 OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2026
01	Layanan Informasi Analisis Keamanan	215.429.000
01.01	Jumlah Layanan Keamanan	
02	Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan Bidang Politik	218.295.000
02.01	Jumlah hasil pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	
03	Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan Bidang Ekonomi	218.295.000
03.01	Jumlah hasil pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	
04	Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan Bidang Sosial Budaya	218.295.000
04.01	Jumlah hasil pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	
05	Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan Bidang Keamanan Negara	233.948.000
05.01	Jumlah hasil pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	
06	Dukungan Manajemen dan teknis Pemeliharaan Kamtibmas dan Ketertiban Masyarakat	2.616.202.000
06.01	Layanan Layanan Perkantoran	
07	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	384.052.000
07.01	Layanan Layanan Perkantoran	
08	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	167.780.000
08.01	Layanan Pembinaan Pengamanan Objek Vital/ Objek Vital Nasional	
09	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang lantas	468.656.000
09.01	Layanan dukungan Manajemen internal	
10	Pembinaan Potkam	917.674.000
10.01	Jumlah hasil pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	
11	Pembinaan Operasi Kepolisian	318.206.000
11.01	Operasi Bidang Keamanan	
Total		5.976.832.000

8 KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026									
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN				
3112	Analisis Keamanan	215.429.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3114	Penyelenggaraan Administrasi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik	217.000.000	0	0	0	0	0	1.295.000	0	0	0
3115	Penyelenggaraan Administrasi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi	217.000.000	0	0	0	0	0	1.295.000	0	0	0
3116	Penyelenggaraan Administrasi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya	217.000.000	0	0	0	0	0	1.295.000	0	0	0
3117	Penyelenggaraan Administrasi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara	232.283.000	0	0	0	0	0	1.665.000	0	0	0

3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	2.505.062.000	0	0	0	0	0	111.140.000	0	0	0	2.616.202.000
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	384.052.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384.052.000
3131	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	0	0	0	0	0	0	167.780.000	0	0	0	167.780.000
3133	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas	0	0	0	0	0	0	468.656.000	0	0	0	468.656.000
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	917.674.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917.674.000
5079	Pembinaan Operasi Kepolisian	318.206.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.206.000
Total		5.223.706.000	0	0	0	0	0	753.126.000	0	0	0	5.976.832.000

Amuntai, 30 Juli 2025



**REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN 2026**

- 1 KEMENTERIAN/ LEMBAGA** : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- 2 SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG** : 05 - Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka, dan Melayani
- 3 PROGRAM** : Program Dukungan Manajemen
- 4 UNIT ORGANISASI (ESELON II)** : Polri Resor Hulu Sungai Utara
- 5 PRIORITAS NASIONAL**

KODE	PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2026
-		32.216.977.000
Total		

6 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2026	ALOKASI 2026
01	Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi		32.216.977.000
01.01	Jumlah kebijakan yang dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksana teknis		
01.02	% kebijakan yang berpihak pada masyarakat		
01.04	% perencanaan dan penganggaran berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah dengan kinerja secara terpadu		
01.05	% pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		
01.06	% unit kerja yang menerapkan administrasi secara akuntabel		
01.07	% kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelayanan internal		
02	Mewujudkan Polri yang Profesional, Transparan dan Akuntabel dalam rangka Good Governance dan Clean Goverment sebagai implementasi reformasi Polri		-
02.01	% hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti		
02.02	% tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat		
03	Menyelenggarakan pembinaan dan advokasi hukum serta membangun landasan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayanan		-
03.01	Jumlah Bantuan hukum/saksiPenterjemah/ biaya pengacara/ penyelesaian hukum		
03.02	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan		
Total			32.216.977.000

7 OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2026
01	Layanan bidang keuangan Polri, Humas Polri, Teknologi Informasi, Kedokteran dan Kesehatan, Perencanaan Umum dan Anggaran serta kesejahteraan Polri	32.216.977.000
01.01	Persentase Layanan bidang keuangan Polri, Humas Polri, Teknologi Informasi, Kedokteran dan Kesehatan, Perencanaan Umum dan Anggaran serta kesejahteraan Polri.	-
Total		32.216.977.000

8 KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
3070	Penerangan Masyarakat	149.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	149.160.000	
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	31.935.728.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.935.728.000	
3089	Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri	14.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.700.000	
3090	Penegakkan Tata tertib dan Disiplin Polri	12.267.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.267.000	
3091	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan	42.382.000	0	0	0	0	0	0	0	0	42.382.000	
3155	Penyusunan dan Penyuluhan Hukum	25.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.850.000	
5051	Penyusunan Kebijakan Polri	15.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.050.000	
5053	Reformasi Birokrasi Polri	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	
5054	Manajemen Anggaran	16.840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.840.000	
Total		32.216.977.000	0	32.216.977.000								

Amuntai, 30 Juli 2025

